



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LAPORAN TAHUNAN 2017

REFORMASI
HUKUM



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini telah disusun Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun Anggaran 2017. Bahwa untuk mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Laporan tahunan ini disusun sebagai upaya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu berfungsi sebagai upaya mewujudkan *good governance* jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2017. Selain itu pula untuk mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, laporan tahunan ini menjadi sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan jajaran berada pada angka 91,98 % (sembilan puluh satu koma sembilan puluh delapan persen), baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM maupun kegiatan teknis lainnya.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, selama tahun anggaran 2017 Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta telah menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2014-2019 dalam 8 (delapan) area perubahan dan mengembangkan berbagai program berbasis elektronik (*e-government*) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan memberikan pelayanan publik terbaik di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY adalah muara akhir tujuan seluruh jajaran Kemenkumham. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, harapan publik akan pelayanan sesuai aturan akan terwujud dan masyarakat memperoleh kepastian. Mari kita gelorakan semangat pengabdian, kita tingkatkan kinerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. Tumbuhkan semangat kerja Nyata, kerja PASTI (*one team, one vision, one goal*), dan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah

[Handwritten Signature]
GUNARSO
NIP. 19580923 198103 1 002



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Tugas dan Fungsi.....	3
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017	10
BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
1. Divisi Administrasi.....	24
2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	47
3. Divisi Pemasyarakatan.....	75
4. Divisi Keimigrasian.....	83
B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017.....	92
C. Realisasi Anggaran.....	114
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Rencana Tahun 2018.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pihak, semua kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2017 harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga kepada seluruh masyarakat dan *stake holder* khususnya para penerima layanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertimbangan tersebut yang kemudian melatarbelakangi penyusunan laporan tahunan tahun 2017 jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta atas melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Sebagai upaya mewujudkan *good governance* jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 ;
3. Mewujudkan akuntabilitas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, laporan tahunan merupakan sarana bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajaran untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
4. Memahami akan keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017;
5. Mendorong Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peratueran perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

6. Sebagai usaha bersama mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laporan tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 ini berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
4. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS	FUNGSI
DIVISI ADMINISTRASI Melaksanakan tugas sebagian Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan lapotan; 3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rummah tangga; dan 4. Pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi
Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2. Pengelolaan teknologi informasi, pengolahan data dan penyajian informasi, serta pelayanan pengaduan;

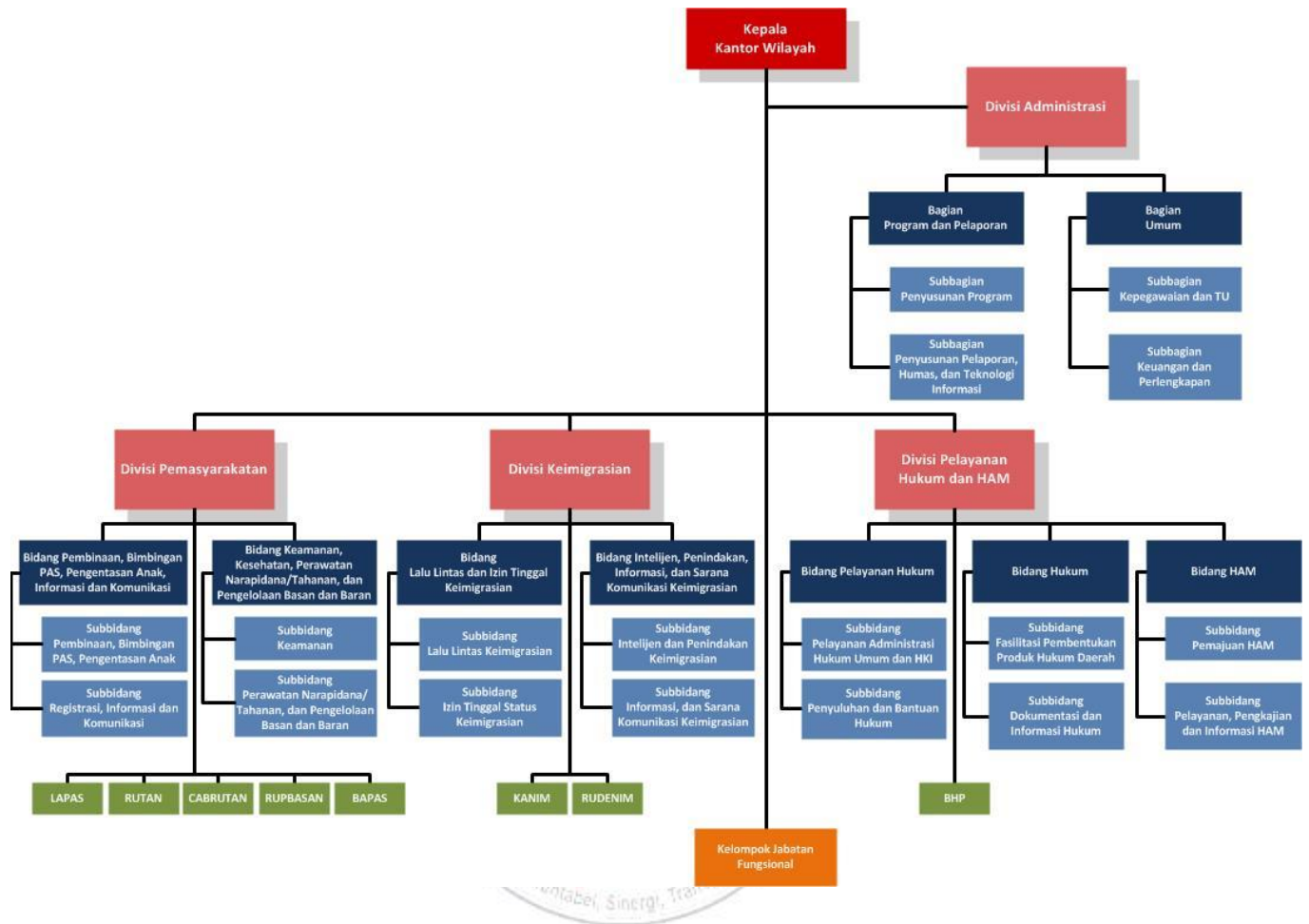
<p>penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan komunikasi, protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga serta evaluasi dan laporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga; dan 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
<p>Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan tata usaha, serta rumah tangga, dan melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha; 2. Pengelolaan urusan kepegawaian; 3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; 4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan; dan 5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
<p>DIVISI PEMASYARAKATAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, informasi dn komunikasi, keamanan, kesihatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; 4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasaranan, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemsarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi
<p>Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemsarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.

<p>laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi</p>	
<p>Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; dan 2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
<p>DIVIS KEIMIGRASIAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan 4. Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi
<p>Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan

dokumen perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal keimigrasian, dan status kewarganegaraan	
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta informasi dan sarana komunikasi keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
DIVISI YANKUM Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah; pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penelitian di bidang hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
Bidang Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

<p>mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah</p>	<p>teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah.
<p>Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis; dan 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014).



SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi serta 16 UPT, 15 (lima belas) UPT Pemasarakatan dan 1 (satu) UPT Imigrasi.

No	UPT	ALAMAT
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 376126-375802 Fax (0274) 376126 Email : lapasjogja86@yahoo.com
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Kaliurang Km. 17 Yogyakarta Telp. (0274) 895433 Faksimili : (0274) 895422 Email : lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN	Alamat Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman 55288 Yogyakarta Telp/Fax : (0274) 867585 Email : lapas_sleman@yahoo.co.id Website : www.lapassleman.com
4	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Taman Siswa No. 6A Yogyakarta Telp. (0274) 450247 Fax. (0274) 450248 Email : rutanjogja@gmail.com
5	RUTAN KELAS IIB BANTUL	Jalan Guwosari Pajangan Bantul Telp. (0274) 6462012 Faks : 6461011 Email : rutan.bantul@yahoo.co.id
6	RUTAN KELAS IIB WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : www.wonosarirutan@ymail.com
7	RUTAN KELAS IIB WATES	Jalan Suparman No. 03 Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773051 Fax (0274) 773015 Email : rutanwates@yahoo.co.id
8	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 374307 Fax (0274) 376324 Email : bapas_yogyakarta@yahoo.co.id
9	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 392929 Email : bapaswonosari@yahoo.com
10	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa No. 8 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 419435 – 389170 Email : rupbasanyak@gmail.com , rupbasanyak@yahoo.com Website : www.rupbasanjogja.com
11	RUPBASAN BANTUL	Jalan Srandakan Pandak Wijirejo Pandak Bntul 55761 Telp/Faksimile : (0274) 6462376 Email : rupbasanbantul@yahoo.com
12	RUPBASAN WONOSARI	Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp./Fax : (0274) 394185 Email : rupbasan_wonosari@yahoo.com
13	RUPBASAN WATES	Jalan Sugiman Gang Bispa No. 1 Wates Telp./Fax : (0274) 7496799, 775322 Email : rupbasanwates@gmail.com ,
14	KANTOR IMIGRASI	Jalan Solo Km 10 Yogyakarta. Po.Box. 10 YKAP Telp (0274) 487130, 489165 Email : kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta 55111 Email : lpjogja2016@yahoo.co.id
16	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK YOGYA	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : lpkajogja@gmail.com

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Pada tahun 2017, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY melaksanakan kegiatan dengan 10 (sepuluh) DIPA. Untuk merealisasikan 10 (sepuluh) DIPA tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY melaksanakan program sebagai berikut:

- * Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian Hukum dan HAM DIY, Pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM;
- * Program Administrasi Hukum Umum, Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah;
- * Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah;
- * Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah;
- * Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Kekayaan di Kantor Wilayah;
- * Program Pembentukan Hukum, Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah;
- * Program Pemajuan Hak Asasi Manusia, Penyelenggarakan Pemajuan HAM di Wilayah;
- * Program Pembinaan Hukum Nasional, Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah;
- * Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah;
- * Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah.

1. Kegiatan

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut masih berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program, oleh sebab itu diperlukan operasionalisasi dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

a. Divisi Pemasarakatan

Penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah.

Untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah, Divisi Pemasarakatan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi Bintorwasdal terhadap UPT PAS;
2. Menerima usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) dari Lapas/Rutan;
3. Menerima laporan bulanan dari UPT;
4. Menerima usulan remisi dari Lapas/Rutan;
5. Monitoring Sistem Database Pemasarakatan (SDP);
6. Melaksanakan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) secara terjadwal dan insidental di seluruh UPT PAS;
7. Pengarsipan data Divisi Pemasarakatan.

b. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia;
2. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang notariat;
3. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang kewarganegaraan.
4. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;
5. Hasil kajian hak asasi manusia.
6. Dokumen permohonan HKI yang diterima Kantor Wilayah;
7. Promosi dan diseminasi di daerah;
8. Penegakan hukum di daerah;
9. Database kekayaan intelektual komunal.
10. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
11. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah.
12. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat daerah;
13. Penelitian dan pengembangan sistem hukum di daerah;
14. Dokumentasi dan jatingan informasi hukum di daerah;

15. Kesadaran hukum masyarakat daerah;
16. Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum.

c. Divisi Imigrasi

Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian.

Untuk merealisasikan kegiatan Pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RKA-K/L fungsi Keimigrasian;
2. Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian;
3. Pembinaan Koordinasi dan konsultasi program kegiatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian;
5. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi bidang lalu lintas dan izin tinggal Keimigrasian.

d. Divisi Administrasi

1. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor wilayah;
2. Layanan keuangan Kanwil Kemenkumham;
3. Layanan penata usahaan BMN Kanwil Kemenkumham;
4. Layanan kepegawaian Kanwil Kemenkumham;
5. Layanan kehumasan Kanwil Kemenkumham;
6. Layanan perkantoran;
7. Peralatan dan fasilitas perkantoran;
8. Gedung/ bangunan.
9. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

e. Permasalahan Dan Pencapaian

Permasalahan / Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi / Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY antara lain:

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2017	CAPAIAN TAHUN 2017	CAPAIAN TAHUN 2016
<p><i>DIVISI ADMINISTRASI Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha</i></p>	<p>Kegiatan seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2017 masih menggunakan anggaran ABT</p>	<p>A. Pengelolaan Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Kepegawaian • Baperjakat Eselon IV dan V • Ujian CAT Seleksi Jabatan Struktural Eselon IV dan V • Penerimaan CPNS Tahun 2017 • Penyelenggaraan Ujian Dinas Tk. I <p>B. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Operator SA BMN dan SIMAK • Pendidikan dan Pelatihan • Pendidikan Petugas Pengamanan (P2U) 	<p>A. Pengelolaan Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Kepegawaian • Pembinaan SPIIP • Diseminasi SIMPEG new 015 • Internalisasi Perka BKN tentang Jabatan Fungsional Tertentu • Penyelenggaraan Ujian Dinas Tk. I <p>B. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diklat Kesamaptaan • Diklat Dasar Pemasarakatan • Diklat Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja • Bimtek Pengelolaan Kepegawaian
<p><i>Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan</i></p>	<p>1. Usulan RKBMN yang sudah disetujui oleh DJKN tidak secara langsung dapat terealisasi di RKAKL tahun berjalan.</p> <p>a. RUTAN Wates (kendaraan roda dua)</p> <p>b. RUPBASAN Wonosari (kendaraan roda empat)</p> <p>2. Pelaksanaan pemusnahan arsip pada RUTAN Wates yang sudah disetujui oleh ANRI belum dapat dilaksanakan</p>	<p>1. Laporan Keuangan satker TA 2016, laporan keuangan bulan Januari s/d Desember TA 2017, Laporan keuangan Semester I TA 2017, dan laporan keuangan Triwulan III Komprehensif TA 2017 untuk satker 409180, 409181, 409182, 409183, 409184, 409185,409186, 409187,409188, dan 409189.</p> <p>2. Laporan Keuangan Wilayah TA 2016, Laporan keuangan Wilayah Semester I TA 2017, dan laporan keuangan</p>	<p>1. Laporan Keuangan satker TA 2015, laporan keuangan bulan Januari s/d Desember TA 2016, Laporan keuangan Semester I TA 2016, dan laporan keuangan Triwulan III Komprehensif TA 2016 untuk satker 409180, 409181,409182,409183,409184,409185,409186, 409187,409188, dan 409189.</p> <p>2. Laporan Keuangan Wilayah TA 2015, Laporan keuangan Wilayah Semester I TA 2016, dan laporan keuangan wilayah</p>

	<p>dikarenakan Satker tidak mempunyai alokasi dana untuk menanggung biaya perjalanan pejabat dan/atau pegawai dari Biro Umum sebagai saksi dalam pelaksanaan pemusnahan.</p> <p>Masih terdapat pembelanjaan aset yang tidak sesuai dengan Mata Anggarannya tanpa dilakukan revisi terlebih dahulu.</p>	<p>wilayah Triwulan III Komprehensif TA 2017 untuk satker 409180, 409181, 409182, 409183,409184,409185,409186, 409187,409188, dan 409189.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal. 4. Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu. 5. Penerimaan PNBP wisma tamu bulan Oktober s/d Desember 2017 sebesar 8.971.000,- dan penerimaan sewa rumah dinas bulan Oktober s/d Desember 2017 sebesar Rp1.978.914.000,- 6. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN. 7. Pembayaran gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja pegawai secara tepat waktu. 8. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 (belum dilakukan rekonsiliasi data dengan KPPN) untuk DIPA: <ul style="list-style-type: none"> • 409180 sebesar Rp5.019.764.734,00 atau 99.86% • 409181 sebesar Rp16.827.804.894,00 atau 106.07% • 409182 sebesar Rp748.476.380,00 atau 97.93% 	<p>Triwulan III Komprehensif TA 2016 untuk satker 409180, 409181,409182, 409183, 409184, 409185, 409186, 409187,409188, dan 409189.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal. 4. Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu. 6. Penerimaan PNBP wisma tamu bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp17.676.000,- dan penerimaan sewa rumah dinas bulan Januari s/d Desember 2016 sebesar Rp8.045.752,-. 5. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN. 6. Pembayaran gaji, uang makan, tunjangan kinerja pegawai secara tepat waktu. 7. Pengajuan Usulan Penghapusan BMN pada bulan Agustus, Oktober, dan November 2016. 8. Pengajuan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN pada bulan Agustus dan September 2016. 9. Pengajuan Usulan Pemanfaatan BMN pada bulan September 2016. 10. Realisasi anggaran
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • 409183 sebesar Rp881.159.589,00 atau 99,90% • 409184 sebesar Rp228.057.000,00 atau 100,00% • 409185 sebesar Rp194.130.697,00 atau 99,55% • 409186 sebesar Rp239.454.500,00 atau 99,87% • 409187 sebesar Rp2.125.071.350,00 atau 93,29% • 409188 sebesar Rp86.800.000,00 atau 99,48% • 409189 sebesar Rp437.840.022,00 atau 90,88% <p>Capaian Pengelolaan BMN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengelolaan BMN : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa <ul style="list-style-type: none"> ➢ RUTAN Yogyakarta ➢ LP Yogyakarta b. Penetapan Status Penggunaan BMN c. Penjualan BMN dengan tindaklanjut Penghapusan BMN d. Hibah masuk e. Penetapan Keputusan Penghapusan 2. Pengajuan RKBMN <ol style="list-style-type: none"> a. Satker Eselon I b. Wilayah Eselon I 3. Laporan BMN 	<p>sampai dengan 31 Desember 2016 (belum dilakukan rekonsiliasi data dengan KPPN) untuk DIPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 409180 sebesar Rp1.573.804.309,00 atau 78,29% • 409181 sebesar Rp15.857.071.566,00 atau 97,66% • 409182 sebesar Rp398.991.739,00 atau 96,82% • 409183 sebesar Rp403.276.645,00 atau 96,25% • 409184 sebesar Rp219.419.835,00 atau 99,74% • 409185 sebesar Rp192.225.000,00 atau 98,58% • 409186 sebesar Rp197.741.946,00 atau 96,39% • 409187 sebesar Rp1.908.168.506,00 atau 96,29% • 409188 sebesar Rp68.000.000,00 atau 99,48% • 409189 sebesar Rp827.767.955,00 atau 96,64% <p>Prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat Pertama dalam kategori pengelolaan APBN Semester I TA 2016 untuk Kategori Pagu dibawah 4 Milyar Rupiah (kode satker 409183); 2. Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan
--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> a. Semester II Tahun Anggaran 2016 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Satker Eselon I ➤ Wilayah Eselon I b. Semester I Tahun Anggaran 2017 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Satker Eselon I ➤ Wilayah Eselon I 	<p>Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UAPPA-W Tahun 2016 (kode satker 409182)</p> <p>3. Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UAPPA-W Tahun 2016 (kode satker 409183)</p>
<i>Sub Bag Penyusunan Program</i>	1. Serapan Anggaran yang belum sepenuhnya maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya usulan RKA-KL Pagu Indikatif TA 2018; 2. Tersusunnya usulan RKA-KL Pagu Anggaran TA 2018; 3. Tersusunnya usulan RKA-KL Pagu Alokasi TA 2018; 4. Pendampingan Penyusunan RKA-KL TA 2018 ke masing-masing divisi dan UPT; 5. Tersusunnya Program Kerja dan Rencana Kerja TA 2018; 6. Tersusunnya Disbursement Plan, Procurement Plan, Kalender Kerja dan Kalender Kegiatan TA 2018; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya usulan RKA-KL Pagu Indikatif TA 2017; 2. Tersusunnya usulan RKA-KL Pagu Anggaran TA 2017; 3. Tersusunnya usulan RKA-KL Pagu Alokasi TA 2017; 4. Pendampingan Penyusunan RKA-KL TA 2017 ke masing-masing divisi dan UPT; 5. Tersusunnya Program Kerja dan Rencana Kerja TA 2017; 6. Tersusunnya Disbursement Plan, Procurement Plan, Kalender Kerja dan Kalender Kegiatan TA 2018;
<i>Sub Bag Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana prasarana yang dipergunakan dalam hal urusan kedinasan; 2. Terlambatnya pengiriman data laporan kegiatan triwulan di lingkungan unit kerja Kanwil Kemenkumham DIY ke Bagian PP, sehingga menghambat proses upload dan pengiriman laporan ke pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdokumentasinya kegiatan 2. Terpenuhinya informasi kepada masyarakat 3. Terpublishnya berita melalui website 4. Terjawabnya Hasil Temuan Inspektorat Jenderal 5. Tersusunnya Laporan Kegiatan Kantor pada Triwulan III dan IV 2017 6. Tersusunnya Laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaporkannya laporan triwulan Tahun 2016 dan target capaian; 2. Terdokumentasinya kegiatan jajaran Kanwil Kemenkumham DIY 3. Terpublikasinya berita kegiatan jajaran Kanwil Kemenkumham DIY 2016 berita melalui website;

	<p>3. Belum tersedianya forum konferensi pers;</p> <p>4. Koordinasi antar Kanwil dengan insan pers belum optimal;</p> <p>5. Perlunya peningkatan kemampuan jurnalistik pegawai di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas, dan TI</p> <p>6. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik diantara pegawai di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas, dan TI</p> <p>7. Perlunya rapat dan koordinasi lebih lanjut dalam hal penerbitan buletin</p> <p>8. Belum adanya pegawai yang mempunyai kemampuan di bidang IT</p>	<p>Target Capaian untuk Triwulan III dan IV tahun 2017</p> <p>7. Tersusunnya LAKIP tahun 2017</p> <p>8. Berhasil mengunggah Laporan Program Aksi B12 tahun 2017, 100%</p> <p>9. Akhir Triwulan IV telah disampaikan Laporan Capaian Realisasi Anggaran kepada BAPPENAS pada tanggal awal Januari 2018.</p> <p>10. Terlaksananya Kegiatan pendampingan SPIP</p>	<p>4. Terbangunnya jejaring dengan media massa, baik cetak maupun elektronik khususnya di lokal DIY;</p> <p>5. Publikasi kegiatan Kanwil Kemenkumham DIY tahun 2016;;</p> <p>6. Terpenuhinya informasi kepada masyarakat;</p> <p>7. Menjawab Hasil Temuan Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI;</p> <p>8. Terlaporkannya LAKIP tahun 2016;</p> <p>9. Terlaporkannya Laporan Tagret Kinerja Tahun 2016;</p> <p>10. Terlaksananya Laporan Capaian Realisasi Anggaran Monev bapennas dan Kementerian Keuangan tahun 2016</p>
<i>DIVISI KEIMIGRASIAN</i>	<p>1. Sumber daya manusia yang menguasai IT yang masih terbatas;</p> <p>2. Kurangnya personel dalam rangka pengawasan keimigrasian;</p> <p>3. Belum tersedianya biaya perawatan sarana pelayanan keimigrasian;</p>	<p>1. Telah terpenuhinya pencapaian target 99,9 % penyerapan anggaran 2017</p> <p>2. Pembinaan/koordinasi Konsultasi Pengawasan Divisi Imigrasi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>3. Pembukaan Unit Layanan Paspor</p>	<p>1. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Pembinaan, koordinasin dan konsultasi bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal dan status keimigrasian</p>
<i>DIVISI YANKUM DAN HAM SUBBID Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM</i>	<p>1. Sebagian Penyampai Komunikasi tidak paham, tidak bisa membedakan permasalahan hukum dan permasalahan HAM.</p> <p>2. Permasalahan yang disampaikan oleh</p>	<p>1. Permasalahan dugaan pelanggaran HAM telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat koordinasi dan surat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak yang dikomunikasikan.</p> <p>2. Tersedia dan</p>	<p>1. Terlaksananya konsultasi, koordinasi, klarifikasi dan mediasi.</p> <p>2. Terwujudnya surat tanggapan/ pemberitahuan kepada penyampai komunikasi dan surat</p>

	<p>Pemyampai Komunikasi menyangkut beberapa pihak terkait, sehingga membutuhkan waktu agak lama, untuk koordinasi dan klarifikasi dalam menyelesaikan atau menindaklanjuti permasalahan pemyampai komunikasi</p>	<p>terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan Yankomas Tahun 2017.</p> <p>3. Terwujudnya Laporan Aksi HAM tahun 2017</p>	<p>koordinasi kepada pihak yang dikomunikasikan sehingga telah terjadi klarifikasi.</p> <p>3. Tersedianya dan terwujudnya Laporan Pelaksanaan Yankomas Tahun 2016.</p> <p>4. Terwujudnya Laporan Aksi HAM tahun 2016</p>
<p><i>DIVISI YANKUM DAN HAM Subbid Pemajuan HAM</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendala dalam koordinasi dengan OPD terkait sehingga dimungkinkan untuk membentuk forum bersama. 2. Narasumber kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Wilayah harus dari Pusat. Hal ini menjadi kendala karena waktu dan ketersediaan narasumber tidak pasti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Diseminasi HAM di 3 kab/kota 2. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan RANHAM 2017 3. Terselenggaranya Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM 2017 4. Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Terselenggaranya Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah dan Pusat 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Diseminasi HAM di 3 kab/kota 2. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan RANHAM 2016 3. Terselenggaranya Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM 2016 4. Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Terselenggaranya Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah dan Pusat 2016
<p><i>DIVISI YANKUM DAN HAM SUBBID Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitas tenaga penyuluh hukum guna mendukung percepatan budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di DIY. 	<p>Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2017;</p> <p>Terlaksana baik sesuai rencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan Hukum ▪ Konsultasi Hukum ▪ Inventaris Penyuluhan Hukum ▪ Monitoring Desa Sadar Hukum 	<p>Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2016 terlaksana baik sesuai rencana dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Hukum Terpadu : 5 Kegiatan 2. Temu Sadar Hukum : 3 Kegiatan 3. Pameran Penyuluhan

	<p>2. Keterbatasan buku liflet, brosur, tentang hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, kelompok kadarkum, desa binaan/ desa sadar hukum.</p> <p>3. Pembinaan kadarkum belum berjalan optimal mengingat anggaran pembinaan desa/ keluarga binaan/ keluarga sadar hukum tidak seimbang dengan jumlah desa binaan / desa / keluarga sadar hukum yang telah ada terbentuk.</p> <p>4. Untuk Adendum Bantuan Hukum tidak tepat waktu / sehingga memperlambat penyerapan anggaran.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal</p>	<p>Semua kegiatan dapat berjalan sesuai target meskipun tanpa didukung anggaran dan sarana prasarana</p>	<p>Hukum : 1 Kegiatan</p> <p>4. Lomba Kadarkum Tk. Nasional : 1 Kegiatan</p> <p>5. <u>Bantuan Hukum</u> :</p> <p>Litigasi : 278 Perkara</p> <p>Non Litigasi : 77 Kegiatan</p> <p>Monitoring/Evaluasi Pengawa : 31 Kegiatan</p>
<p><i>DIVISI YANKUM DAN HAM SUBBID Pelayanan Administrasi, Hukum Umum dan HKI</i></p>	<p>Bahwa dalam penggunaan anggaran kegiatan AHU dan HKI, terdapat 2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu PPK Kontraktual dan PPK Kegiatan sehingga sering sekali memperdebatkan terkait pengkoordinasian pembayaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bahwa sering terjadi keterlambatan termin penagihan pada tiap</p>	<p>Terkait dengan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, adalah Kantor Wilayah pertama dengan jumlah permohonan tertinggi se-Indonesia yaitu lebih dari 2000 pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual</p>	

	bulannya.		
<i>DIVISI YANKUM DAN HAM Subbid Dokumentasi dan Informasi Hukum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang disusun, hal tersebut dikarenakan turunnya anggaran tidak tepat waktu, terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan bidang lain dalam satu pagu BPHN; 2. Beberapa kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan untuk digunakan oleh pegawai dengan golongan tertentu, dalam pelaksanaannya diganti pegawai dengan golongan yang berbeda, sehingga penggunaan anggaran harus disesuaikan kembali; 3. Keberadaan DIH/Perpustakaan belum menjadikan prioritas utama, kadang masih dilihat sebelah mata; 4. DIH/Perpustakaan belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, termasuk pendanaannya masih sangat terbatas; 5. DIH/Perpustakaan belum didukung Sumber Daya Manusia yang relevan (belum ada petugas yang berlatar belakang Pustakawan dan petugas Teknologi Informasi). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan DIH 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan DIH; 3. Inventarisasi Raperda/Perda; 4. Langgaran Koran dan Majalah; 5. Fumigasi; 6. Pembelian buku hukum baru DIH Kanwil; 7. Koordinasi DIHN ke Pusat; 8. Monitoring dan evaluasi ke DIH UPT; 9. Pencetakan leaflet dalam rangka kerja sama antar instansi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan DIH 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan DIH; 3. Inventarisasi Raperda/Perda; 4. Langgaran Koran dan Majalah; 5. Fumigasi; 6. Pembelian buku hukum baru DIH Kanwil; 7. Koordinasi DIHN ke Pusat; 8. Monitoring dan evaluasi ke DIH UPT; 9. Pencetakan leaflet dalam rangka kerja sama antar instansi.
<i>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM Sub Bid Fasilitas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih digunakannya pihak ke 3 untuk 	Harmonisasi Perda – 26 Perda	Harmonisasi Perda – 29 Perda

<p><i>Pembentukan Produk Hukum Daerah</i></p>	<p>menyusun NA-Raperda.</p> <p>2. Masih sulitnya pihak pemrakasa menerima saran dari Kanwil.</p> <p>3. Adanya Perancang yang mengundurkan diri.</p> <p>4. Kurang tenaga JFU sebagai pendukung administrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Perdais - 2 Rapergub <p>Mediasi & Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 58 Raperda <p>Penyusunan NA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 NA <p>Peningkatan Kompetensi</p> <p>- 40 Orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Rapergub - 3 Raperwal <p>Mediasi & Konsultasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 67 Perda - 61 Raperda <p>Penyusunan NA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 NA <p>Peningkatan Kompetensi</p> <p>- 40 orang</p>
<p><i>DIVISI PEMASYARAKATAN Subbid Registrasi, Informasi dan Komunikasi</i></p>	<p>1. Masih adanya keterlambatan dalam pelaporan data-data WBP baik softcopy (sms gateway) maupun melalui hardcopy (Lapbul Subtantif).</p> <p>2. Implementasi aplikasi SDP terkadang masih mengalami kendala jaringan internet maupun prasarana</p>	<p>Implementasi aplikasi SDP di Lapas/Rutan sudah dilaksanakan secara optimal</p>	<p>Terlaksananya layanan Pemasyarakatan di wilayah, yakni implementasi aplikasi SDP di Lapas/Rutan sudah dilaksanakan secara optimal</p>
<p><i>Subbid Pembinaan, Bimbingan PAS dan Pengentasan Anak</i></p>	<p>1. Masih terbatasnya SDM khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan aplikasi SDP PB online baik dalam penggunaan maupun kualias data</p> <p>2. Masih terbatasnya SDM khusus yang bertanggung jawab penuh (termasuk regenerasi SDM) terhadap pengelolaan aplikasi SDP PB online baik dalam penggunaan maupun kualias data</p> <p>3. Keterbatasan sarana pendukung dalam pelaksanaan PB Online seperti alat scan berkas</p>	<p>1. Kendala yang ada di dalam pelaksanaan aplikasi PB online secara teknis dapat diselesaikan dengan baik karena setiap data yang masuk secara online di kanwil dilakukan koreksi kembali</p> <p>2. Kendala yang ada di dalam pelaksanaan aplikasi PB online secara teknis dapat diselesaikan dengan baik oleh Kanwil karena setiap data yang masuk secara online di kanwil dilakukan koreksi kembali termasuk scan berkas usulan dari Lapas/Rutan karena</p>	

	dokumen usulan PB, PC maupun printer yang kurang memadai	belum tersedianya alat scan yang memadai di Lapas/Rutan.	
<i>Subbid Keamanan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana belum maksimal 2. Informasi pengaduan di masyarakat belum optimal 3. Kurang optimalnya kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum 4. Kekuatan antara regu jaga WBP tidak sebanding/seimbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas Kamtib dan Was Intern berjalan dengan Baik dan lancar; 2. Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasarakatan Kondusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas Kamtib dan Was Intern berjalan dengan Baik dan lancar; 2. Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasarakatan relatif terjaga dengan baik dan kondusif.
<i>Subbid Perawatan, Pengelolaan Baran dan Basan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pegawai di Subbid Perawatan, Pengelolaan Baran dan Basan sebanyak 2 orang, dengan kualifikasi bisa mengoperasikan komputer 2. Belum adanya tenaga tenaga medis di UPT khususnya Rutan Kelas IIB Wonosari 3. Belum adanya tenaga penaksir pada Rupbasan 4. Perlunya koordinasi dengan intansi terkait (rupbasan wonosari) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan terlaksana dengan baik 2. Tersusunnya laporan penyalahgunaan narkoba 3. Tersusunnya laporan pengelolaan basan baran 4. Monitoring dan evaluasi perawatan dan kesehatan 5. Serta basan baran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan terlaksana dengan baik 2. Tersusunnya laporan penyalahgunaan narkoba 3. Tersusunnya laporan pengelolaan basan baran 4. Monitoring dan evaluasi perawatan dan kesehatan 5. Serta basan baran

BAB III

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama. Selain itu, dalam tataran ideal, akuntabilitas tersebut sebagai pengukuran atas tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, rencana strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sistem penyampaian pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Pemasyarakatan, Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi serta Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menyusun Laporan Tahunan tahun 2017 dengan berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun Anggaran 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah DIY yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Divisi Administrasi

Peningkatan kualitas perencanaan kerja dan anggaran satuan kerja

a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY tahun 2017 mempunyai 16 unit pelaksana teknis dan 1 Kantor Wilayah dengan 10 DIPA. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2017 menggunakan formulasi jumlah RKA-KL yang disusun oleh seluruh unit kerja telah tersusun dengan jumlah 17 unit kerja

Target penyusunan RKAKL Tahun 2018 : 17 Unit Kerja/ 1 Laporan

Jumlah RKAKL Tahun 2018 disusun : 15 Unit Kerja/ 1 Laporan

% Capaian : $(15/17) \times 100\% = 88\%$

b. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan terhadap 16 unit kerja/ UPT dan 1 Kantor Wilayah.

Target Monitoring : 17 Unit Kerja/ 1 Laporan

Jumlah Monitoring yang dilaksanakan : 17 Unit Kerja/ 1 Laporan

% Capaian : $(17/17) \times 100\% = 100\%$

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbag Keuangan dan Perlengkapan antara lain:

Peningkatan kualitas Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham selama tahun 2017 menargetkan 12 bulanan layanan. Berbagai kegiatan untuk menopang peningkatan kualitas Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham selama tahun 2017, dengan berbagai kegiatan diantaranya ialah; Pengarahan Kepala Biro Pengelolaan BMN tentang Optimalisasi Pengelolaan BMN sebagai tindak lanjut opini BPK di Aula Kanwil KUMHAM DIY tanggal 8 Juni 2017, dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Biro Keuangan di Aula Kanwil KUMHAM DIY tanggal 15 Juni 2017.



Pengarahan Kepala Biro Pengelolaan BMN tentang Optimalisasi Pengelolaan BMN



Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Biro Keuangan

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DINERACA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017**

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	82,110,721	0	82,110,721
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
131111	Tanah	55,954,736,000	0	55,954,736,000
132111	Peralatan dan Mesin	13,314,458,342	10,601,994,364	2,712,463,978
133111	Gedung dan Bangunan	12,916,091,000	216,914,071	12,699,176,929
134111	Jalan dan Jembatan	0	0	0
134112	Irigasi	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	379,438,670	0	379,438,670
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	14,500,000	14,500,000	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	276,399,500	106,410,500	169,989,000
J U M L A H		82,937,734,233	10,939,818,935	71,997,915,298

No.	Rumah Dinas	Ket
1.	Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	Jl. Sunaryo No. 6 Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
2.	Rumah Dinas Kepala Divisi Administrasi	Jl. HOS Cokroamkinoto 158, Tegalrejo, Yogyakarta
3.	Rumah Dinas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Jl. HOS Cokroaminoto No. 158 Tegalrejo, Yogyakarta
4.	Rumah Dinas Kepala Bagian PPL	Jl. Kenanga TR III/769, Tegalrejo, Yogyakarta
5.	Rumah Dinas Kepala Bidang Hukum	Jombor Lor 83, Sinduadi, Mlati, Sleman
6.	Rumah Dinas	Jombor Baru Blok 8 No.187, Sendangadi, Mlati, Sleman
7.	Rumah Dinas	Jl. Margotirto, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
8.	Rumah Dinas	Jl. HOS Cokroamkinoto 158, Tegalrejo, Yogyakarta
9.	Rumah Dinas	Jl. Pleret, Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul



Rumah dinas Jl. Pleret, Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul

Peruntukan Kendaraan Dinas

No.	Jenis Barang	Merk / Type	Nomor Polisi	Penanggung Jawab	
				Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Nissan Serena	AB 1159 DE	Gunarso	Kepala Kantor Wilayah
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota All New Vios 1,5 VVTI	AB 58	Rusmilah, S.H., M.H	Kepala Bagian Umum
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	AB 1764 UA	F. Surya Kumara	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	AB 1004 UA	Yudi Arto, S.H	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Perlengkapan
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Avanza	AB 1778 UA	Susanti Yuliandari, S.E., M.Hum	Kepala Sub Bag. Penyusunan Program
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Kijang	AB 1934 UA	Rusmilah, S.H., M.H	Kepala Bagian Umum
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Innova	AB 1064 UC	Ruh Harijadi, A.Md.IP, S.Pd	Kepala RUPBASAN Wonosari

No.	Jenis Barang	Merk / Type	Nomor Polisi	Penanggung Jawab	
				Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	Honda Supra	AB 2576 DE	Nanang Kurniawan	JFU Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
2	Sepeda Motor	Suzuki Smash	AB 2025 IH	Yunianto	JFU Pada Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum
3	Sepeda Motor	Honda Karisma	AB 2951 UA	F. Surya Kumara, S.H., M.H	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan
4	Sepeda Motor	Honda Supra X	AB 2952 UA	Slamet Wuryanto	JFU pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	AB 2176 IA	Tutik Nur Eni, S.Sos	Ka. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
6	Sepeda Motor	Honda Legenda	AB 2105 IA	Dian Saraswati	Bendahara Pengeluaran
7	Sepeda Motor	Honda Supra	AB 2530 IH	Wardiyono, S.H., M.H	JFU Pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
8	Sepeda Motor	Suzuki Smash	AB 2026 IH	Sarwono Toetoeg Indrijanto, S.Pd, MH	Kepala Sub Bidang Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian
9	Sepeda Motor	Suzuki Smash	AB 2027 IH	Yudi Arto, S.H	Ka. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
10	Sepeda Motor	Grand Imprensa	AB 2525 UH	Halim Surya Adhi Pratama Putra	JFU Pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Peningkatan kualitas fungsi kepegawaian (Penatausahaan dan Pembinaan/Pengembangan Kepegawaian)

Untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan fungsi kepegawaian, Subag Kepegawaian dan TU menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menopang Penatausahaan dan Pembinaan/Pengembangan Kepegawaian untuk 1.121 pegawai, dengan berbagai kegiatan diantaranya ialah:

No.	Kegiatan	Ket
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksana
2.	Baperjakat Eselon IV dan V	Terlaksana
3.	Penyelenggaraan Kegiatan Ujian Dinas TK. I	Terlaksana
4.	Penguatan Reformasi Birokrasi Di Wilayah dan Monitoring Pelaksanaannya	Terlaksana
5.	Pengarahan dan Penguatan SDM Petugas Pemasarakatan Dalam Rangka Perang Melawan Narkoba Di Lapas dan Rutan	Terlaksana
6.	Kegiatan Internalisasi Pengendalian Zona Integritas	Terlaksana
7.	Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2017	Terlaksana
8.	Kegiatan Diklat Kesamaptaan	Terlaksana
9.	Pelatihan Operator SA BMN / SIMAK	Terlaksana
10.	Pencanangan janji kinerja Tahun 2017	Terlaksana
11.	Pengajian bersama ASN	Terlaksana



Deklarasi Janji Kinerja Pegawai Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan Tahun 2017

Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kemampuan skill kepada petugas di jajaran Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menangani dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, dan diharapkan menjadi petugas yang responsive, bersih, jujur dan berkarakter yang sesuai dengan jiwa Pancasila, berwibawa, mandiri, professional yang dilandasi dedikasi yang tinggi.

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan diikuti 30 orang peserta, yang terdiri dari :

- Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta : 1 orang
- Bapas Kelas I Yogyakarta : 1 orang
- Lapas Kelas IIA Yogyakarta : 3 orang
- Lapas Narkotika Kelas Ila Yogyakarta : 3 orang
- Lapas Kelas IIB Sleman : 2 orang
- Rutan Kelas IIA Yogyakarta : 3 orang
- Rutan Kelas IIB Bantul : 3 orang
- Rutan Kelas IIB Wates : 3 orang
- Rutan Kelas IIB Wonosari : 3 orang
- Rupbasan Kelas I Yogyakarta : 2 orang
- Rupbasan Kelas II Bantul : 2 orang
- Rupbasan Kelas II Wates : 2 orang
- Rupbasan Kelas II Wonosari : 1 orang

Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara/Pejabat/Instruktur yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kesamaptaan yaitu Pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM baik pusat maupun daerah, Polda DIY dan Instruktur dari Detasemen A Pelopor Satbrimobda Yogyakarta.

Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan di lingkungan Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 05 April 2017 s.d 18 April 2017, bertempat di Detasemen A Pelopor Satbrimobda Daerah Istimewa Yogyakarta.



Diklat Kesamaptaan dilaksanakan di Satbrimobda DIY tanggal 05 – 18 April 2017

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SIMAK BMN

Perkembangan Aplikasi SIMAK BMN seiring dengan perubahan kebijakan/- regulasi oleh Kementerian Keuangan RI, baik di bidang keuangan maupun Barang Milik Negara menimbulkan beberapa kendala/keterlambatan SDM yang ada di Satker untuk menerima perkembangannya, sehingga hal ini akan menghambat Satker dalam mengirim laporan BMN, dengan adanya kegiatan ini akan bermanfaat bagi unit kerja dalam mengelola BMN yang berada di satuan kerja masing-masing.

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Operator Sistem Akuntansi BMN/SIMAK BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 30 orang peserta, yang terdiri dari :

1. Kantor Wilayah : 4 orang
2. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta : 1 orang
3. BAPAS Kelas I Yogyakarta : 2 orang
4. LAPAS Kelas IIA Yogyakarta : 2 orang
5. LAPAS Narkotika Kelas IIA : 2 orang
6. LPKA Kelas II Yogyakarta : 1 orang
7. LAPAS Perempuan Kelas IIB Yogyakarta : 1 orang
8. LAPAS Kelas IIB Sleman : 2 orang

9. RUTAN Kelas IIA Yogyakarta : 2 orang
10. RUTAN Kelas IIB Bantul : 2 orang
11. RUTAN Kelas IIB Wates : 2 orang
12. RUTAN Kelas IIB Wonosari : 2 orang
13. RUPBASAN Kelas I Yogyakarta : 2 orang
14. RUPBASAN Kelas II Bantul : 2 orang
15. RUPBASAN Kelas II Wates : 1 orang
16. RUPBASAN Kelas II Wonosari : 1 orang
17. BAPAS Kelas II Wonosari : 1 orang

Tenaga Pengajar adalah Widyaiswara/Pejabat/Pegawai yang memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan BMN yaitu Pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM baik pusat maupun daerah serta KPKNL Yogyakarta.

Bimbingan Teknis Operator Sistem Akuntansi BMN/SIMAK BMN di lingkungan Kantor Wiayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 3 Mei 2017 s.d 5 Mei 2017, bertempat di Hotel Neo Yogyakarta.



Bimbingan Teknis SIMAK BMN di Hotel Neo

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U)

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) dilaksanakan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi Petugas P2U Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta agar pelaksanaan tugas di lapangan lebih maksimal dan dapat meminimalisir terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang pegawai dari Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dilaksanakan di Balai Diklat Industri Yogyakarta. Dalam diklat ini ditambahkan materi tentang penanggulangan bencana dan penggunaan teknologi x-Ray untuk mendeteksi barang bawaan pengunjung.



Diklat Petugas Pengamanan Pintu Utama

Pelaksanaan Pengajian Bersama Aparatur Instansi di DIY

Pengajian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta diikuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pengajian bersama yang diikuti ASN dari Instansi di DIY

Pelaksanaan Seleksi CPNS

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2017 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, dan Sat Brimobda DIY. Adapun tahapan seleksi penerimaan CPNS adalah: Verifikasi Berkas PO BOX, Verifikasi Berkas Asli dan Pengukuran Tinggi Badan, CAT SKD, CAT SKB, Kesamaptaan, Wawancara dan Pemberkasan.

Jumlah Pelamar CPNS, sebagai berikut :

- a. **Kualifikasi Pendidikan SLTA/Sederajat untuk formasi Penjaga Tahanan :**
 - 1) Peserta Pendaftar online sejumlah **7.394** orang
 - 2) Berkas masuk melalui PO BOX sejumlah **6.403** berkas;
 - 3) Yang memenuhi syarat sejumlah **4.576** berkas;
 - 4) Peserta Verifikasi Berkas Asli dan Pengukuran Tinggi badan sejumlah **4.576** orang :

- 1) Hadir sejumlah : **4.245** orang
 - Memenuhi syarat : 3.809 org
 - Tidak memenuhi syarat : 436 org
- 2) Tidak hadir sejumlah : **331** orang
- 5) Peserta Seleksi Kompetensi Dasar sejumlah **3.809** orang
- 6) Peserta Seleksi Kompetensi Bidang sejumlah **480** orang
- 7) Peserta SKB melalui Kesamaptaan dan PFK sejumlah **480** orang, terdiri dari :
 - Peserta laki-laki sejumlah 330 orang
 - Peserta wanita sejumlah 150 orang
- 8) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dan melaksanakan pemberkasan sejumlah **160** orang terdiri dari :
 - Peserta laki-laki sejumlah 110 orang
 - Peserta wanita sejumlah 50 orang

b. Kualifikasi Pendidikan Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter dan Sarjana

- 1) Peserta Seleksi Kompetensi Dasar Sarjana sejumlah 1.869 orang
- 2) Nilai SKD yang memenuhi passing grade sejumlah **1.799** orang terdiri dari :
 - Peserta umum sejumlah 1218 orang
 - Peserta cumlaude sejumlah 581 orang
- 3) Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sejumlah **581** orang terdiri dari :
 - Peserta SKB melalui CAT sejumlah 567 orang;
 - Peserta SKB melalui Praktek Komputer sejumlah 14 org
- 4) Seleksi Kompetensi Bidang Sarjana melalui Wawancara diikuti oleh **581** orang.
- 5) Peserta yang dinyatakan lulus CPNS dan melaksanakan Pemberkasan data CPNS sejumlah 265 orang, terdiri dari:
 - Pembimbing Kemasyarakatan Pertama 61 orang
 - Analis Keimigrasian Pertama 160 orang
 - Pemeriksa Merk Pertama 1 orang
 - Pemeriksa Paten Pertama 4 orang

- Analisis Kekayaan Intelektual	1	orang
- Analisis Hukum	12	orang
- Analisis Pelindungan Hak Sipil dan HAM	4	orang
- Penata Keuangan	1	orang
- Kustodian Kekayaan Negara	1	orang
- Pengelola Teknologi Informasi	3	orang
- Perawat Pertama	8	orang
- Psikolog Klinis Pertama	1	orang
- Auditor Pertama	5	orang
Jumlah	261	orang
Tidak hadir pemberkasan	4	orang



Kegiatan verifikasi berkas asli seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017



Kegiatan CAT SKB tingkat sarjana di BKN DIY



Kegiatan Tes Kesamaptaan seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017



Kegiatan Tes Wawancara Seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017

DAFTAR PESERTA YANG LOLOS CPNS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

URAIAN	JUMLAH
Tingkat S1	26
Tingkat SLTA	Laki-laki 110
	Perempuan 50
Total	186

* Kegiatan Pengendalian Zona Integritas

Kegiatan Pengendalian Zona Integritas melalui Internalisasi Budaya Kerja, Whistleblowing System, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Gerakan Revolusi Mental di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta serta perwakilan dari UPT.



Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM



Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM

* Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I

Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Dilaksanakan pada tanggal 28 Desember

2017, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut berjumlah 9 orang.

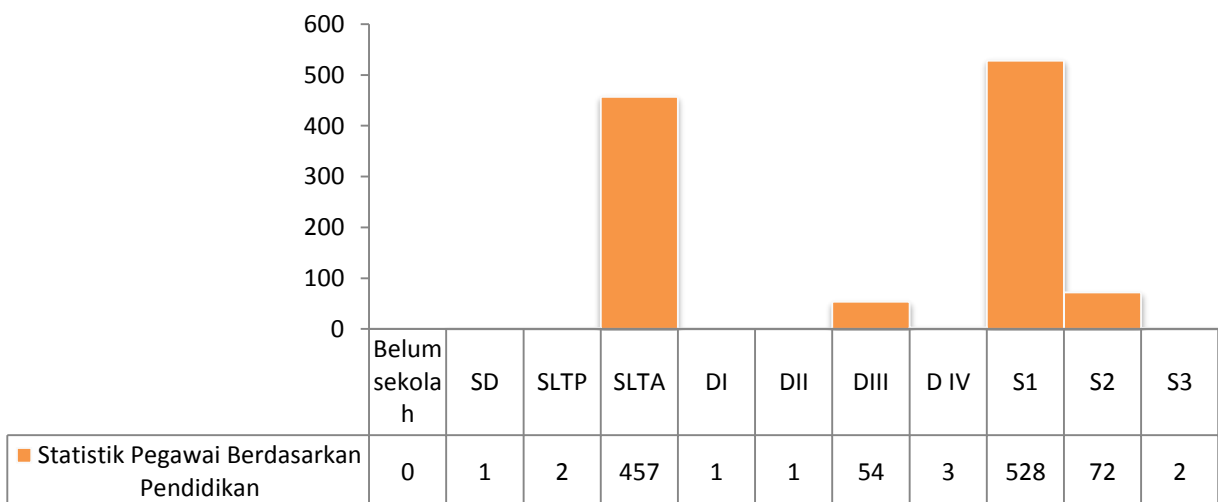


Kegiatan Ujian Dinas Pegawai Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

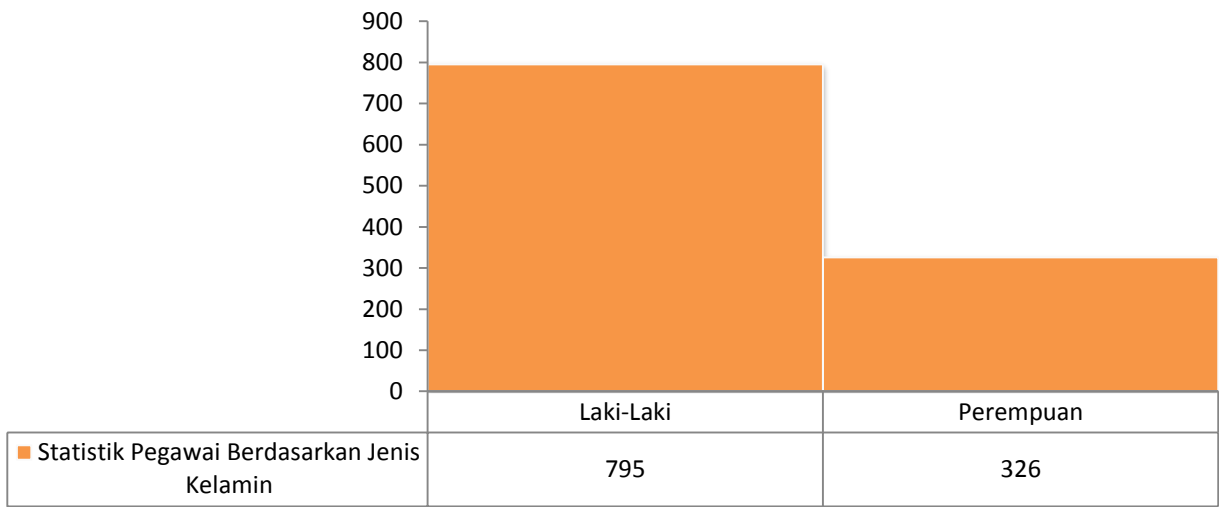
DATA PEGAWAI JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY TAHUN 2017 SEBANYAK 1.121 ORANG

Data diambil dari <http://simpeg.kemenkumham.go.id/SIAP> tanggal 2 Januari 2018

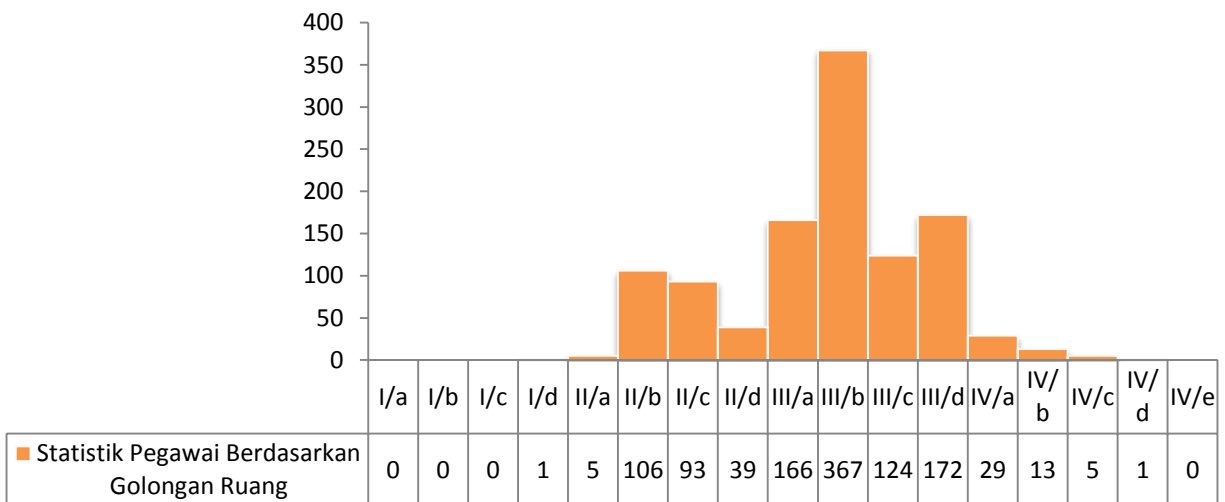
Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



Pengukuran capaian indikator kinerja pembinaan Kepegawaian menggunakan formulasi pengukuran jumlah Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah target layanan yang akan dilaksanakan sebanyak: 1.121 Orang.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fungsi Kehumasan

Selama tahun 2017, Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas, dan TI melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.

- a) Peliputan dan Penyusunan Berita Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY selama tahun 2017.

TANGGAL	JUDUL
29-12-2017	Apel Bersama Jajaran kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Menjelang Tahun Baru 2018
28-12-2017	Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Kakanwil resmikan Unit Layanan Paspor
27-12-2017	Sebanyak 71 Warga Binaan Pemasyarakatan D.I. Yogyakarta Terima Remisi Natal
22-12-2017	Peringatan Hari Ibu Wujud Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia
20-12-2017	"Press Release" Capaian Kinerja Tahun 2017 Kanwil Yogyakarta
19-12-2017	Kakanwil Lantik Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembimbing Kemasyarakatan
18-12-2017	Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tahun 2017 Kanwil Kemenkumham DIY
14-12-2017	Penerimaan DIPA Tahun 2018 Lebih Awal
13-12-2017	Pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kanwil Kemenkumham DIY
08-12-2017	Peningkatan Sumber Daya Manusia Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY
28-10-2017	Meriahnya Jalan Sehat Kanwil Kemenkumham DIY
27-10-2017	Bhakti Sosial Kanwil Kemenkumham DIY Ke Panti Asuhan
23-10-2017	Tes Seleksi Kesamaptaan Kualifikasi Pendidikan SMA Hari-1 Kanwil kemenkumham DIY
12-10-2017	Pelaksanaan Kegiatan Desiminasi HAM Kanwil Kemenkumham DIY
02-10-2017	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kanwil Kemenkumham DIY
20-09-2017	Kunjungan Ditjen PP Kemenkumham Terkait Penyiapan Bahan Revisi UU Masyarakat Seleksi Verifikasi Berkas dan Tinggi Badan Serta Ujian CAT Kanwil Kemenkumham DIY Berjalan Lancar
19-09-2017	LAKIP Tahun 2017 Semester I
10-09-2017	Jadwal Verifikasi Dokumen Asli dan Pengukuran Tinggi Badan Tingkat SMA Hasil Seleksi Administrasi CPNS SMA dan S1 Jadwal dan Lokasi Ujian Peserta CAT S1
06-09-2017	Penguatan Pengawasan Terkait Informasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System Kanwil Kemenkumham DIY
05-09-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Lakukan Pengumpulan dan Pengolahan Data Implementasi HAM DIY
31-08-2017	Peringati 5 Tahun Keistimewaan DIY, Kanwil Kemenkumham DIY Gelar Upacara
30-08-2017	Kakanwil Kemenkumham DIY Buka Kegiatan Konsultasi Implementasi Kebijakan Dan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kabupaten / Kota Peduli HAM

	Perlu ada penanganan secara spesifik dan ruangan khusus bagi pelaku/ korban klitih
	Pembebasan Lahan untuk Bandara Kulon Progo Telah Rampung 91 Persen
	P2TP2A RDU Yogyakarta mengikuti Rapat dalam kantor pemutakhiran data informasi HAM Direktorat Jenderal HAM
29-08-2017	BPJS Tidak Bisa Digunakan Untuk Cuci Darah Yang Ketiga Kalinya
	Rapat Telaahan Yankonmas
	Rapat Koordinasi Yankonmas
	Penelaahan Yankomas
	Perlunya Konfirmasi Data ke Instansi Terkait Demi Kelancaran Penyusunan Laporan
25-08-2017	Kakanwil Kemenkumham DIY Lantik Pejabat Fungsional
24-08-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Raih Juara Stand Terbaik
	Perubahan Tempat Ujian CPNS S1 : Ujian CAT bagi peserta formasi S1 yang semula dilaksanakan di Jakarta akan dilaksanakan di Yogyakarta.
22-08-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Tingkatkan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah
21-08-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Ikut Partisipasi Pameran Pembangunan DIY 2017
	Kakanwil Serahkan Tropi Pemenang Lomba Kebersihan Kantor UPT DIY
17-08-2017	Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Kanwil Kemenkumham DIY
16-08-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Gelar Lomba Baca Teks Proklamasi
15-08-2017	Penyerahan SK Remisi Dalam Rangka Peringatan Hari Kemerdekaan R.I
	Meriah, Lomba Lukis Anak Kanwil Kemenkumham DIY
	Kakanwil Kemenkumham DIY Audiensi Dengan Gubernur DIY
10-08-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Lakukan MOU Dengan Ombudsman RI Terkait Penerimaan CPNS 2017
09-08-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Gelar Lomba Desain Batik
08-08-2017	Panitia Seleksi CPNS 2017 Kanwil Kemenkumham DIY Terima Arahan Sekjen
07-08-2017	Panitia Seleksi Penerimaan CPNS 2017 Kanwil Kemenkumham DIY Terima Arahan Sekjen
02-08-2017	Rapat Rekrutmen Seleksi CPNS Kanwil Kemenkumham DIY
31-07-2017	APEL PENCANANGAN BULAN SEMARAK KEMERDEKAAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY
28-07-2017	Kanwil Kemenkuham DIY Sambut Pimpinan Baru
26-07-2017	R. Natanegara Hadiri Launching Buku Mapenaling Rutan Bantul
18-07-2017	Tindak Lanjut Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Bidang HAM Kanwil Kemenkumham DIY Terhadap Seorang WNA
11-07-2017	Mantap,,!!Kanwil Kemenkumham DIY Sabet 3 Penghargaan Sekaligus
	Melalui Evaluasi Kinerja, Kanwil Kemenkumham DIY Tingkatkan Prestasi Kerja
10-07-2017	Bidang HAM Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY Jalin Kerjasama dengan Setda Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta
05-07-2017	Plt. Kakanwil Lakukan Sidak di Kanim Jogja
03-07-2017	Syawalan Ajang Silaturahmi dan Saling Memaafkan di Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY

22-06-2017	Sosialisasi WBK/WBBM Bagi Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY Apel Bersama Kanwil Hukum dan HAM DIY Buka Bersama Jajaran kanwil Kemenkumham DIY Plt. Kakanwil Hadiri Wisuda Santri WBP Rutan Bantul Wisuda Santri
01-06-2017	Saya Indonesia, Saya Pancasila
24-05-2017	Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM
23-05-2017	R. Natanegara : "Tingkatkan Sinergi Petugas Pemasarakatan, Warga Binaan dan Lingkungan" Gema Takbir Bergema Menyambut Bulan Suci Ramadhan di Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta
22-05-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Yang Ke-109
18-05-2017	Dirjen PP Kunjungi Lapas Wirogunan Penutupan Konsultasi Teknis Pemasarakatan Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan dan Pengelolaan Basan dan Baran
17-05-2017	Plt. Kakanwil Tekankan Peningkatan Attitude dan Integritas ASN Kemenkumham Kanwil Kemenkumham DIY Upayakan Peningkatan SDM Petugas Lapas/Rutan Pembukaan Kegiatan Konsultasi Teknis Pemasarakatan tentang Implementasi SDP dan Remisi Online Tahun 2017
16-05-2017	DHARMA WANITA KANWIL KEMENKUMHAM DIY SELENGGARAKAN "TALKSHOW" KESEHATAN Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2017
15-05-2017	Penutupan Konsultasi Teknis Pemasarakatan Indahnya Kebersamaan Bersama Dengan Bapak Dewa Putu Gede Pembukaan Konsultasi Teknis Pemasarakatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM 2015-2019
12-05-2017	Penutupan Diklat SIMAKBMN Kakanwil Kemenkumham DIY Melakukan Sidak Ke Rupbasan Yogya Kanwil Kemenkumham DIY Mengadakan Diklat Simak BMN Kakanwil Kemenkumham DIY Melaksanakan Sidak Ke Bapas Yogyakarta Kunjungan Kerja Ditjen AHU How To Handle The Press!
04-05-2017	PERAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI ASN
19-04-2017	Samapta 2017 Kanwil Kemenkumham DIY telah berakhir
13-04-2017	Kanwil Kemenkumham DIY Siap Melaksanakan Layanan Publik Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi
13-04-2017	OPEN BIDDING UPAYA PENINGKATAN KINERJA JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY
11-04-2017	Kemenkumham DIY Tingkatkan SDM Demi Peningkatan Kualitas Layanan Publik
19-01-2017	Serah Terima Jabatan Kepala Rutan Bantul Syahril Yuska Kepada Dwi Arnanto
17-01-2017	Kakanwil Kemenkumham Diy, Pramono Hadiri Sertijab Ka Bapas Wonosari Pelantikan Karupbasan Wonosari Dilingkungan Kemenkumham Diy
16-01-2017	Soleh Joko Sutopo Pimpin Rutan Wates Gantikan Hero Sulistyono
12-01-2017	Pelantikan Pejabat Eselon Iii Dan Iv Kanwil Kemenkumham Diy

- b) Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan TI melaksanakan kegiatan Pendampingan SPIP pada tanggal 7 Desember 2017 dengan narasumber dari BPKP perwakilan DIY.

Kegiatan pendampingan SPIP dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh tentang penyusunan Laporan SPIP jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan UPT.



- c) Publikasi kegiatan Kanwil Kemenkumham DIY, dalam bentuk: pembuatan laporan, iklan dan *pres conference*, dokumentasi, spanduk, backdrop, banner dan ATK.

No	Kegiatan	Jumlah	Ket
1.	Spanduk, Backdrop, Banner	80 Buah	
2.	Dokumentasi Foto	4 Laporan	
3.	Iklan	4 Iklan	
4.	Press Conference	12 Kali	
5.	Target Kinerja	4 Laporan	
6.	Laporan Triwulan	4 Laporan	
7.	Target Capaian	4 Laporan	
8.	Kliping	4 Laporan	
9.	Laporan Tahunan	1 Laporan	
10.	LAKIP	2 Laporan	

- d) Kerjasama Instansi dengan Ombudsman Perwakilan Propinsi D.I. Yogyakarta
Kerjasama yang dilakukan dalam rangka menciptakan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 yang jujur dan transparan. Dibentuk pula Pojok Pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2017.



Kerjasama antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan Ombudsman perwakilan DIY



Pembukaan Pos Pengaduan Seleksi CPNS Kanwil Kemenkumham DIY

1. Divisi Pelayanan Hukum dan Ham

Ditjen HAM dan Balitbang Hukum dan HAM

- * Pada 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum berupa Penyediaan bahan bacaan, peminjaman buku dan peraturan.
- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Diseminasi HAM yang diantaranya dilaksanakan terhadap badan yang ada di Kabupaten/ Kota di Propinsi DIY.
- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Pelayanan komunikasi masyarakat, menerima dan memberikan konsultasi terhadap masyarakat.
- * Pada tanggal 8 Mei 2017 bertempat di Balai Diklat PU telah dilaksanakan Koordinasi penilaian kabupaten/ Kota peduli HAM yang diikuti 30 perwakilan SKPD se DIY.
- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah dalam Perspektif HAM yang dilaksanakan Tim Kajian Isu Aktual HAM.
- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan RanHAM dengan perwakilan SKPD di Propinsi DIY.



Rakor RANHAM 30 Agustus 2017

- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 telah dilaksanakan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Raperda/Perda yang meliputi kegiatan Penyusunan Raperda, harmonisasi Raperda, dan harmonisasi Perda. Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah Kantor wilayah, Biro hukum provinsi, DPRD provinsi/Kab/Kota, bagian hukum kab/kota, satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan ini diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pegawai negeri sipil di daerah dan Stakeholder.
- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 telah dilaksanakan Peta Permasalahan Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2017 dengan melakukan pengumpulan data secara langsung ke lembaga penegakan hukum dan instansi/lembaga yang menangani permasalahan/kerawanan di dalam masyarakat antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bappeda, BKAD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Badan Kesbangpol, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan Kab. Bantul, dll
- * Dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember 2017 telah dilaksanakan Inventarisasi Proram Legislasi Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Maret tahun 2017 dengan melakukan pengumpulan data secara langsung ke DPRD Prov/Kabupaten/Kota dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Biro Hukum Provinsi.
- * Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan Perda/Raperda yang meliputi :
 1. Rapat Persiapan
Yang di dalamnya terdapat kegiatan membuat surat keputusan pembentukan tim, mengirimkan surat pemberitahuan permohonan inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan perda/raperda ke biro huku/bagian hukum kab/kota dan Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota;
 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan perjalanan dinas untuk menginventarisir data ke Biro Hukum Provinsi dan DPRD Provinsi serta 5 (lima) Bagian Hukum dan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Melakukan Analisa dan Pemetaan atas Data, serta mengklasifikasikan Perda dan Raperda berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Menyusun laporan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

- * Telah melaksanakan Kajian Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah DIY yang dilaksanakan Perancang Perundang-Undangan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah setempat.
- * Selama tahun 2017, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY melakukan fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah, dalam bentuk memfasilitasi harmonisasi pembentukan raperda dengan mengirimkan tenaga perancang ke rapat-rapat pembahasan/penyusunan Raperda di Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah; Memfasilitasi harmonisasi pembentukan raperda dengan menunjuk pejabat struktural/tenaga perancang sebagai narasumber yang honorinya dibayarkan DIPA ketika membahas sebuah raperda di Pemda; dan memfasilitasi harmonisasi pembentukan raperda dengan membentuk tim penyusun raperda dan melakukan rapat penyusunan raperda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY serta mengundang instansi atau lembaga terkait; melakukan pengumpulan data secara langsung ke lembaga penegakan hukum dan instansi/lembaga yang menangani permasalahan/kerawanan di dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penyusunan peta permasalahan hukum;
- * Kegiatan Inventarisasi Program Legislasi Daerah dilakukan dengan cara menginventarisir program pembentukan peraturan daerah di Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana program pembentukan perda di daerah dengan rencana pembangunan daerah dan rencana dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;



Penguatan HAM bagi Guru di Yogyakarta

Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

* Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum

a. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Majelis Pengawas Wilayah Notaris mempunyai tugas selama satu tahun anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu menerima laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dari MPD di tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menerima laporan kasus mengenai notaris yang ada di masing-masing kabupaten/kota, untuk melakukan sidang atas laporan kasus di MPD.

Majelis Pengawas Daerah Notaris dilaksanakan selama satu tahun anggaran untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah menerima pengaduan dari masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dari Notaris atau terjadi ketidaknetralan notaris dalam menangani kasus tertentu. Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan pemeriksaan protokol notaris minimal satu kali selama setahun.

1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah MKD/ MPW/ dan MPD

a. Pelantiklan MPD

Kegiatan Pelantikan Pengurus MPD, Notaris baru, PPNS dan Pewarganegaraan ini dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 10 Februari 2017
 Pukul : 09.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta
 Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pengurus
 MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama Pengurus MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan yang di lantik dan diambil sumpah, adalah sebagai berikut :

NO	Nama	No. Surat Keputusan	Wilayah Kerja
1	Guntoro, SH., M.Kn	W14-105.HM.07.01 Tahun 2017	Majelis Pengawas Daerah Notaris

b. Pelantikan MKN Wilayah dan MPW

Kegiatan Pelantikan MKN Wilayah dan MPW ini dilaksanakan pada:

Hari : Selasa,
 Tanggal : 11 April 2017
 Pukul : 08.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta

Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan MKN Wilayah dan MPW

Kegiatan ini dihadiri oleh Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Direktur Jenderal AHU, seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Pengurus MPD dan INI DIY

Adapun Nama MKN Wilayah dan MPW yang di lantik dan diambil sumpah, adalah sebagai berikut :

NO	Nama	No. Surat Keputusan	Wilayah Kerja
1	Dewa Putu Gedhe	AHU-19HM.07.01 Tahun 2017	Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY
2	Heriyanto	AHU-20 HM.07.01 Tahun 2017	MPW

MAJELIS PENGAWAS WILAYAH

Kegiatan	April	Mei	Juni
• Majelis Pengawas Wilayah	NIHIL	NIHIL	NIHIL
• Pembayaran Honor MPW	Telah dibayarkan (April – Mei)	Telah dibayarkan (april – mei)	Telah dibayarkan (april – mei)

MAJELIS PENGAWAS DAERAH

Kegiatan	April	Mei	Juni
• Pembayaran Honor MPW	Telah dibayarkan (April – Mei)	Telah dibayarkan (april – mei)	Telah dibayarkan (april – mei)

* Pendaftaran Kewarganegaraan

Pendaftaran Kewarganegaraan Republik Indonesia dilaksanakan selama satu tahun anggaran untuk Tahun Anggaran 2017, Pendaftaran kewarganegaraan meliputi Naturalisasi, Pernyataan Memilih, dan pernyataan menjadi warga negara.

Permohonan Pendaftaran Pernyataan Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Ri Pasal 19 Uu No. 12 Tahun 2006 Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

NO	NAMA	ASAL	KET
1	Muhammad Aamir	Pakistan	SK sudah Keluar

Penegasan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen

NO	NAMA	ASAL	KET
1	Jie	Tiong Hoa	Dalam proses
2	Sin	Tiong Hoa	Dalam proses

Permohonan naturalisasi

NO	NAMA	ASAL	KET
1	Mr. Cho	Korea Selatan	Dalam proses

* Pengkajian dan Verifikasi Data Kewarganegaraan

Pengkajian Dan Verifikasi Data Kewarganegaraan dilakukan pada permohonan yang diajukan Warga Negara Asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, dengan melihat persyaratan yang diajukan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku.

Dilakukan 4 kali pemeriksaan dengan data sebagai berikut :

- **15 Mei 2017**

BAP Permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Bagi WNI Keturunan yang tidak Memiliki dokumen Kewarganegaraan

- **31 Maret 2017**

Visitasi WNA India 1 orang

- **8 Juni 2017**

Visitasi WNA asal Tiong hoa Penegasan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen

- **8 Agustus 2017**

Visitasi WNA asal Korea terkait pewarganegaraan

* Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan

Kegiatan Pelantikan Pewarganegaraan ini dilaksanakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Februari 2017

Pukul : 09.00 – Selesai

Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta

Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pengurus
MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan

Hari : Senin

Tanggal : 30 Oktober 2017

Pukul : 09.00 – Selesai

Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta

Acara : Pengambilan Sumpah Pewarganegaraan

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama yang diambil sumpah, adalah sebagai berikut :

NO	Nama	No. Surat Keputusan	Wilayah Kerja
1.	Jagdish Raghani	1/PWI Tahun 2017	Pewarganegaraan

2.	Rajif	2/PWI Tahun 2017	Pewarganegaraan
----	-------	------------------	-----------------

* Sosialisasi Kewarganegaraan

Guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Kewarganegaraan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sangat perlu melakukan Sosialisasi Kewarganegaraan. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh stakeholders yang berkaitan langsung dengan urusan kewarganegaraan agar tidak muncul lagi masalah kewarganegaraan khususnya di daerah D.I. Yogyakarta. Sosialisasi Kewarganegaraan tersebut dilaksanakan pada :

a) Sosialisasi Kewarganegaraan, dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 05 April 2017

Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8,7 Maguwoharjo, Sleman – DIY

b) Materi dalam kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan ini, berupa :

- Narasumber :

1. Didik Heru Praseno Adi, SH., MH

(Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)

2. H. Sisruwadi, SH., M.K.n

(Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta)

3. Josi B. Sugiarto

(Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan)

- Moderator : Santi Mediana Panjaitan, SH., MH

- Materi : Proses, Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan dalam Kependudukan.

- Peserta : 100 orang, terdiri dari unsur :

✓ Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;

✓ Kantor Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;

- ✓ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota;
- ✓ Sekretariat DPRD;
- ✓ Bagian Hukum Kabupaten / Kota;
- ✓ Camat Kabupaten / Kota;
- ✓ Universitas;

* Pengangkatan/Pengambilan Sumpah Notaris dan PPNS

Pengangkatan/Pengambilan Sumpah Notaris Dan PPNS dilaksanakan selama satu tahun anggaran untuk Tahun Anggaran 2017, Kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditiap propinsi. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sebagai berikut :

Notaris merupakan pejabat umum atau suatu lembaga yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan. Sebagai salah satu syarat agar notaris dapat membuat akta notaris harus dilantik dan disumpah terlebih dahulu yang dilakukan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.



Kegiatan Pelantikan Notaris

Kegiatan Pelantikan Notaris baru dan Notaris Pengganti ini dilaksanakan antara lain pada

:

a. Bulan Februari 2017

Kegiatan Pelantikan Pengurus MPD, Notaris baru, PPNS dan Pewarganegaraan ini dilaksanakan pada:

- Hari : Jumat
 Tanggal : 10 Februari 2017
 Pukul : 09.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta
 Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pengurus
 MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama Pengurus MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan yang di lantik dan diambil sumpah, adalah sebagai berikut :

NO	Nama	No. Surat Keputusan	Wilayah Kerja
	Parbantoro Danardono, SH., M.Kn	AHU-00071.AH.02.01 Tahun 2017	Kabupaten Gunung Kidul
	Guntoro, SH., M.Kn	W14-105.HM.07.01 Tahun 2017	Majelis Pengawas Daerah Notaris

b. Bulan Maret 2017

- Hari : Rabu
- Tanggal : 01 Maret 2017
- Pukul : 14.00 – Selesai

- Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta
- Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Notaris dan Notaris
Pengganti

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama Notaris yang di ambil Sumpah Jabatan dan dilantik, adalah sebagai berikut :

No	Notaris	No. Surat Keputusan	Wilayah Kerja
1.	Fariyah Yusriana, SH., M.Kn	AHU-00081.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris di Kabupaten Kulon Progo
2.	Rizqie Yazdadya, SH., M.Kn	AHU-00091.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris di Kabupaten Kulon Progo
3.	Andamawisari, SH., M.Kn	AHU-00101.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris di Kabupaten Kulon Progo
4.	Saeful Bactiar, SH., M.Kn	AHU-00116.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris di Kabupaten Kulon Progo
5.	Endah Trimawarni, SH., M.Kn	AHU-00156.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris di Kabupaten Kulon Progo
6.	Seni Desianti Maulida, M.Kn	AHU-00157.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris di Kabupaten Kulon Progo
7.	Erna Dwi Astuti, Sh.,	AHU-00172.AH.02.01 Tahun	Notaris di Kabupaten

	M.Kn	2017	Gunung Kidul
8.	Maridi, SH	01/KET.CUTI – MPDN.SLEMAN/II/2017	Sebagai Notaris Pengganti



c. Bulan Maret 2017

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 20 Maret 2017
- Pukul : 10.00 – Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta
- Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Baru dan Notaris Pengganti

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama Nama yang di ambil Sumpah Jabatan & dilantik, adalah sebagai berikut :

NO	Nama	No. Surat Keputusan	Keterangan
1.	Hj. Susilowati Achmad, SH	01/Ket.Cuti-MPD.GK/III/2017	MPD Kabupaten Gunung Kidul memberikan cuti kepada yang bersangkutan selama 10 hari terhitung mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 05 April 2017
2.	Triniken Tiyas Tirlin, SH	02/Ket.Cuti-MPDN-Sleman/II/2017	MPD Notaris Kabupaten Sleman memberikan cuti kepada yang bersangkutan selama 10 hari terhitung mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 01 April 2017
3.	Neneng, SH., M.Kn	AHU-00013.AH.02.02 Tahun 2017	Perpindahan Notaris dari Kabupaten Bengkalis menjadi Notaris Kabupaten Bantul
4.	Fadhli Ilhami Utama, SH, M.Kn	AHU-00255.AH.02.01 Tahun 2017	Notaris Baru pada Kabupaten Gunung Kidul

PPNS adalah institusi di luar Polri tersebut, diharapkan dapat membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dari kedua Undang Undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian mengingat kedudukan institusi Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas). Dalam Pelaksanaannya PPNS dilantik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

a. Bulan Januari 2017

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Januari 2017

Pukul : 09.00 – Selesai

Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta

Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama Nama yang di ambil Sumpah Jabatan & dilantik, adalah sebagai berikut :

No	Nama	No. Surat Keputusan	Instansi
1	Lilik Andi Aryanto, SIP., MM	AHU-7.AH.09.01 Tahun 2016	Satuan Polisi PP D.I. Yogyakarta
2	Ahmad Hidayat, SE	AHU-42.AH.09.01 Tahun 2016	Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

3	Drs. Fatoni Budi Prabowo	AHU-55.AH.09.01 Tahun 2014	Satuan Polisi PP Kabupaten Sleman
4	Sutriyanto, SH	AHU-55.AH.09.01 Tahun 2014	Satuan Polisi PP Kabupaten Sleman
5	Sri Madu Rakyato, S.Sos	AHU-30.AH.009.01 Tahun 2016	Dinas Dukcapil Kab. Sleman
6	Sudadi	AHU-6.AH.09.01 Tahun 2015	Dinas Pertanian Kab. Sleman
7	Eko Sugiyanto Ngadirin, SP	AHU-31.AH.09.01 Tahun 2015	Dinas Pertanian, Perikanan, Kehutanan Kab. Sleman
8	Ir. Indah Lestari	AHU-39.AH.09.01 Tahun 2016	Dinas Pertanian, Perikanan, Kehutanan Kab. Sleman

b. Bulan Februari

Kegiatan Pelantikan PPNS ini dilaksanakan pada:

- Hari : Jumat
- Tanggal : 10 Februari 2017
- Pukul : 09.00 – Selesai
- Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta
- Acara : Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pengurus
MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait.

Adapun Nama Pengurus MPD, Notaris Baru, PPNS dan Pewarganegaraan yang di lantik dan diambil sumpah, adalah sebagai berikut :

NO	Nama	No. SK	Wilayah Kerja
1.	Drh. Suwardi	AHU-130.AH.09.02 Tahun 2015	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

* Seminar/Workshop Notaris

Seminar/Workshop Notaris menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Dengan mengundang narasumber/pakar terkait yang dihadiri oleh peserta undangan terdiri dari Notaris, akademisi, MPD, MPW, MKN dan mahasiswa program kenotariatan serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada notaris terkait dengan jabatannya sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat/publik,

* Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Jasa Hukum Umum

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Jasa Hukum Umum meliputi pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan jasa hukum umum antara lain melakukan pemantauan dan pemeriksaan kepada notaris yang melakukan kegiatan pendaftaran fidusia, hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia tersebut, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemantauan ini menggunakan metode pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim yang sudah ditunjuk.

* Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait

a. Instansi Pusat

Koordinasi Konsultasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Tanggal / Hari : 1 -2 Juni 2017 / Kamis – Jumat
 Tempat : Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Nama : Ety Nurbaiti, SH., M.Hum., Bc.IP (Kepala Divisi Pemasayaran)
 Perihal Koordinasi : Terkait dengan Ektradisi Narapidana Lapas Sleman ke Australia

Koordinasi Konsultasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Tanggal / Hari : 6 -7 Juni 2017 / Selasa - Rabu

Tempat : Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Nama : Denny Indaryanto, SH., Bc.IP (Divisi Pemasyarakatan)
 Perihal Koordinasi : Terkait dengan Ektradisi Narapidana Lapas Sleman ke Australia

Koordinasi Konsultasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Tanggal / Hari : 17 April 2017 / Senin
 Tempat : Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Nama : Joko Pitoyo, Bc.IP, SH, Prasetyo Nugroho, S.IP., M.Si, Surya Komara, SH., MH, Sugiman
 Perihal Koordinasi : Penguatan Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Pementeriaan Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Instansi Daerah

1. Koordinasi dengan Pemda Sleman, Pemda Bantul, Balai Bisnis, Sentra HKI
 Koordinasi terkait pelaksanaan EODB dengan Instansi terkait.
2. Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Koordinasi hukum dalam rangka penguatan Dilkumjakpol. Diwilayah D.I Yogyakarta.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
 Audiensi dan Penguatan Koordinasi kelembagaan sekaligus pengenalan Kepala Kantor baru dengan Wakil Gubernur tgl 22 Februari 2017
4. Koordinasi dengan Universitas Gadjah Mada
 Pelaksanaan MOU kerjasama pelaksanaan Beasiswa s2 6 orang pegawai ke Magister Hukum Fakultas Hukum UGM dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY sekaligus dalam rangka Dies Natalis UGM. Dialskanakan pada tanggal 19 Maret 2017.
5. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah Sleman
 Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait Kewarganegaraan di Kabupaten Sleman.
6. Koordinasi dengan Bidang Ekonomi Pemerintah Daerah Sleman
 Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait Pelaksanaan EODB di Kabupaten Sleman.

7. Koordinasi dengan UPT Pemasarakatan

Kegiatan Koordinasi tersebut, dipergunakan untuk kegiatan memperingati hari Kesaktian Pancasila;

8. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait Kewarganegaraan di Kabupaten Bantul.

9. Koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait Pelaksanaan EODB di Kabupaten Bantul.

* Seminar/Workshop Fidusia

Sosialisasi Fidusia dengan metode tanya jawab atau diskusi yang dihadiri oleh peserta yang terkait dengan tema yang akan dipilih, dan mengundang narasumber / pakar terkait. Peserta yang diundang meliputi Notaris, Finance, Bank, dan pihak terkait lainnya. Sosialisasi Fidusia ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya notaris, apabila terdapat peraturan baru atau program baru dari pemerintah pusat yang nanti akan berkaitan dengan jabatannya sebagai notaris. Sosialisasi dilaksanakan satu kali pada :

a) Sosialisasi Fidusia, dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 06 Maret 2017

Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Hotel Eastparc Yogyakarta

Jl. Kapas No. 1 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman – D.I. Yogyakarta

Materi dalam kegiatan Sosialisasi Fidusia ini, berupa :

- Narasumber :

1. Dewa Putu Gede (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta)
2. AKBP Beja (Polda Daerah Istimewa Yogyakarta);
3. Yudi Kurniadi (Ditjen Administrasi Hukum Umum); dan

4. Arfiah N. Anjani (KPKNL Yogyakarta)

- Moderator: Santi Mediana Panjaitan, SH., MH
- Materi : Permasalahan Hukum dalam penjaminan fidusia
- Peserta : 100 orang, terdiri dari unsur :
 - ✓ Notaris di wilayah D.I. Yogyakarta;
 - ✓ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - ✓ Kejaksaan Tinggi / Negeri;
 - ✓ Pengadilan Tinggi / Negeri;
 - ✓ Perusahaan Finance,
 - ✓ Organisasi Bantuan Hukum (OBH);
 - ✓ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b) Sosialisasi Fidusia, dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017
 Pukul : 10.00 s/d 14.00 WIB
 Tempat : Queen Of The South Hotel & Resort
 Jl. Desa Parangrejo RT.13 / RW.13 Kecamatan Purwosari,
 Girijati – Daerah Istimewa Yogyakarta

Materi dalam kegiatan Sosialisasi Fidusia ini, berupa :

- Narasumber :
 1. Dr. Mualimin Abdi, SH., MH (Direktur Jenderal HAM)
 2. Sutanto (Ka.Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM)
 3. Pandam Nurwulan, SH., MH (Ketua Dewan Kehormatan Wilayah INI D.I. Yogyakarta)
- Moderator: Drs. Eko Cahyanto
- Materi : Peran Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan dalam Peningkatan Kualitas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta

- Peserta : 150 orang, terdiri dari unsur :
 - ✓ Seluruh Notaris Se – Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - ✓ Majelis Pengawas Daerah;
 - ✓ Majelis Pengawas Wilayah;
 - ✓ Majelis Kehormatan Notaris; dan
 - ✓ Ikatan Notaris Indonesia (INI).



Rapat Koordinasi Notaris di Hotel Alana Yogyakarta

DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

a. Peliputan Acara yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Jogja adalah:

- Pelantikan Majelis Kehormatan Notaris (11 April 2017)

b. Wawancara di Radio Star FM Yogyakarta

- Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Maret 2017

Pukul : 19.00 – Selesai

Tempat : Jl. AM. Sangaji No. 41 Gedung Harian Yogya – Daerah

Istimewa Yogyakarta

Acara : Sosialisasi AHU dan Kekayaan Intelektual melalui Media

- Pada Kegiatan Sosialisasi Ahu dan Kekayaan Intelektual ini, Kepala Kantor Wilayah di dampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Segenap Pegawai Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta.

c. Liputan Khusus Terkait Rapat Koordinasi Kenotariatan oleh TV Lokal RB TV Yogyakarta

Acara Liputan Khusus Terkait Rapat Koordinasi Kenotariatan oleh TV Lokal RB TV Yogyakarta dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017

Pukul : 10.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : Queen Of The South Hotel & Resort

Jl. Desa Parangrejo RT.13 / RW.13 Kecamatan Purwosari,
Girijati – Daerah Istimewa Yogyakarta

- Materi dalam kegiatan Sosialisasi Fidusia ini, berupa :
- Narasumber :
 1. Dr. Muallimin Abdi, SH., MH (Ketua MPN Pusat sekaligus Direktur Jenderal HAM)
 2. Sutanto (Ka.Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM)
 3. Pandam Nurwulan, SH., MH (Ketua Dewan Kehormatan Wilayah INI D.I. Yogyakarta)
- Moderator : Drs. Eko Cahyanto
- Materi : Peran Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan dalam Peningkatan Kualitas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peserta : 150 orang, terdiri dari unsur :
 - ✓ Seluruh Notaris Se – Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - ✓ Majelis Pengawas Daerah;
 - ✓ Majelis Pengawas Wilayah;
 - ✓ Majelis Kehormatan Notaris; dan

✓ Ikatan Notaris Indonesia (INI).

d. Acara Liputan Khusus Terkait Rapat Koordinasi Kenotariatan oleh TV Lokal RB TV Yogyakarta dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2017

Pukul : 10.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

- Narasumber : DITJEN KI

e. Acara Liputan Khusus Terkait Rapat Koordinasi Kenotariatan Pengurus Pengawil INI dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY oleh TV Lokal RB TV Yogyakarta dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 06 Oktober 2017

Pukul : 10.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

- Narasumber : Pengurus Wilayah INI DIY dan Kepala Kantor Wilayah



1. Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Jasa Hukum

• **Penyewaan Kendaraan Dinas**

Sewa Kendaraan Operasional ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran, Sewa Kendaraan Operasional tersebut dilaksanakan mulai dari 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan.

Total Harga pekerjaan (harga kontrak) Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional tersebut sebesar **Rp. 882.681.600,- (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).**

NO	TYPE KENDARAAN	HARGA SEWA / BULAN	PERIODE SEWA	SUB. TOTAL
1	Fortuner G 2.4 4X2 AT D 2016	15.028.200	12 bulan	180.338.400
2	Fortuner G Lux 2.4 4X2 AT D 2016	14.030.000	12 bulan	168.360.000
3	Fortuner G New MC 2.5 4X2 AT D 2015	14.030.000	12 bulan	168.360.000
4	Innova V 2.0 4X2 AT B 2016	10.022.300	12 bulan	120.267.600
5	Innova V 2.0 4X2 AT B 2016	10.022.300	12 bulan	120.267.600
6	Avanza Grand G AB 1.3 4X2 MT B 2016	5.212.000	12 bulan	62.544.000
7	Avanza Grand G AB 1.3 4X2 MT B 2016	5.212.000	12 bulan	62.544.000
TOTAL HARGA SEWA KENDARAAN				882.681.600,-

- Supplies Fotocopy

No	Kegiatan	Jumlah	Tanggal Pelaksanaan	Nama Perusahaan
1	Supplies Fotocopy	2 Unit	01 Juni – 31 Desember 2017	CV. Karunia Abadi Sentosa

- Supplies PC Komputer

No	Kegiatan	Jumlah	Tanggal Pelaksanaan	Nama Perusahaan
1	Supplies PC Komputer	5 Unit Laptop	01 Juni – 31 Desember 2017	CV. Sentra Semesta Teknologi

2	Supplies PC Komputer	5 Unit Printer	01 Juni – 31 Desember 2017	CV. Sentra Semesta Teknologi
---	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

1. Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Hukum Umum

- Kegiatan Shortcourse Journalistik

No	Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Shortcourse Journalistik bekerjasama dengan Surat Kabar harian Jogja	60 orang	02 Mei 2017	Aula kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

- Kegiatan English Course bekerjasama dengan English First Yogyakarta

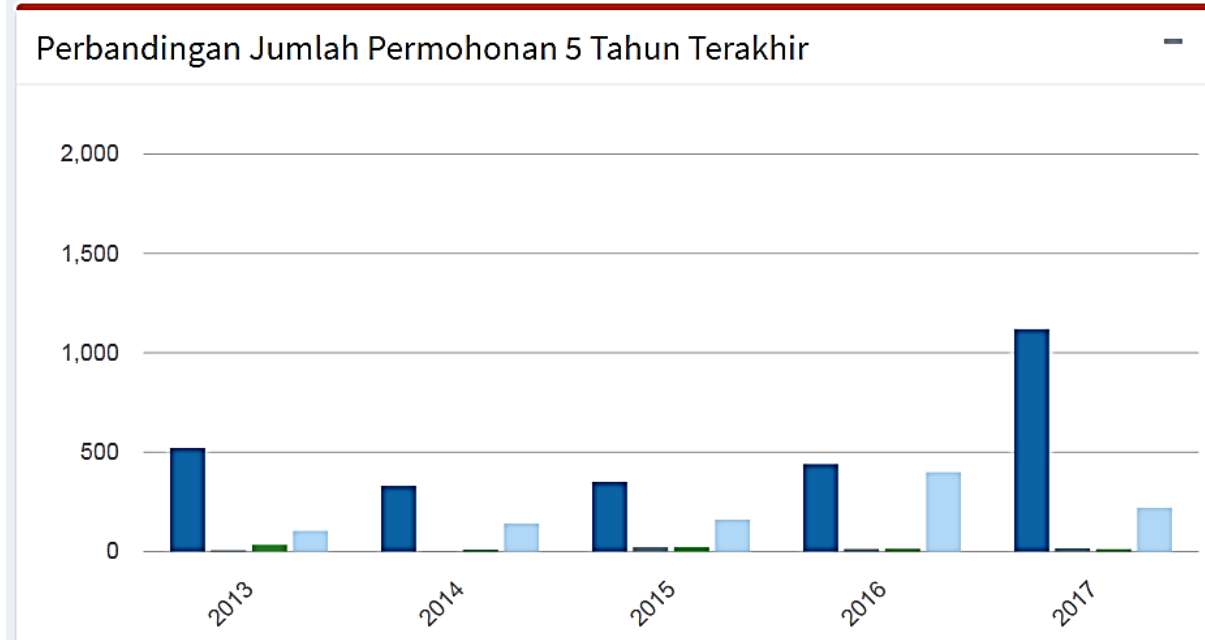
No	Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	English Course bekerjasama dengan English First Yogyakarta	40 orang	05-14 Juni 2017	Aula kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

2. Digitalisasi Arsip Layanan Jasa Hukum

Kegiatan	April	Mei	Juni
Digitalisasi Arsip Layanan Jasa Hukum	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH			NIHIL

Perbandingan Jumlah Permohonan 5 Tahun Terakhir

Statistik Permohonan Kekayaan Intelektual



Sumber : <https://e-kikanwil.dgip.go.id/kanwil/kanwil/permohonan.php>

Permohonan Kekayaan Intelektual pada tahun 2017 melonjak drastis lebih dari dua kali lipat dari permohonan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Propinsi DIY tentang Kekayaan Intelektual meningkat.

Tahun	Permohonan Merek	Permohonan Paten	Permohonan Desain Industri	Permohonan Hak Cipta	Permohonan Indikasi Geografis
2013	522	6	34	105	0
2014	330	1	9	141	0
2015	350	22	22	161	0
2016	440	13	14	400	0
2017	1,120	17	12	221	0

Sumber : <https://e-kikanwil.dgip.go.id/kanwil/kanwil/permohonan.php>

Pada tahun 2017 jumlah permohonan merk mencapai 1.120 permohonan, mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah pemohon tahun 2016 yang hanya 440 permohonan. Sedangkan

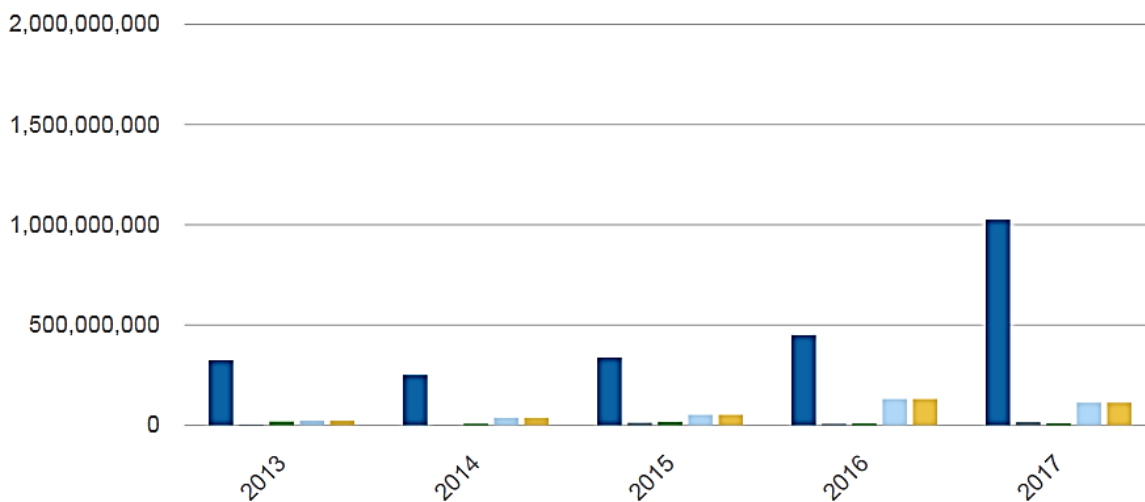
permohonan Hak Cipta mengalami penurunan dari 400 permohonan di tahun 2016 menjadi hanya 221 permohonan di tahun 2017. Pada tahun 2017 belum terdapat permohonan indikasi geografis.

PERBANDINGAN JUMLAH PNBP 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	Permohonan Merek	Permohonan Paten	Permohonan Desain Industri	Permohonan Hak Cipta	Permohonan Indikasi Geografis	Surat Berbayar
2013	324,950,000	3,450,000	18,600,000	22,300,000	0	20,600,000
2014	250,850,000	750,000	7,300,000	37,500,000	0	36,500,000
2015	338,200,000	12,150,000	17,500,000	52,500,000	0	14,610,000
2016	450,600,000	6,850,000	8,100,000	131,100,000	0	24,500,000
2017	1,025,500,000	15,600,000	8,750,000	113,000,000	0	29,850,000

Sumber : <https://e-kikanwil.dgip.go.id/kanwil/kanwil/permohonan.php>

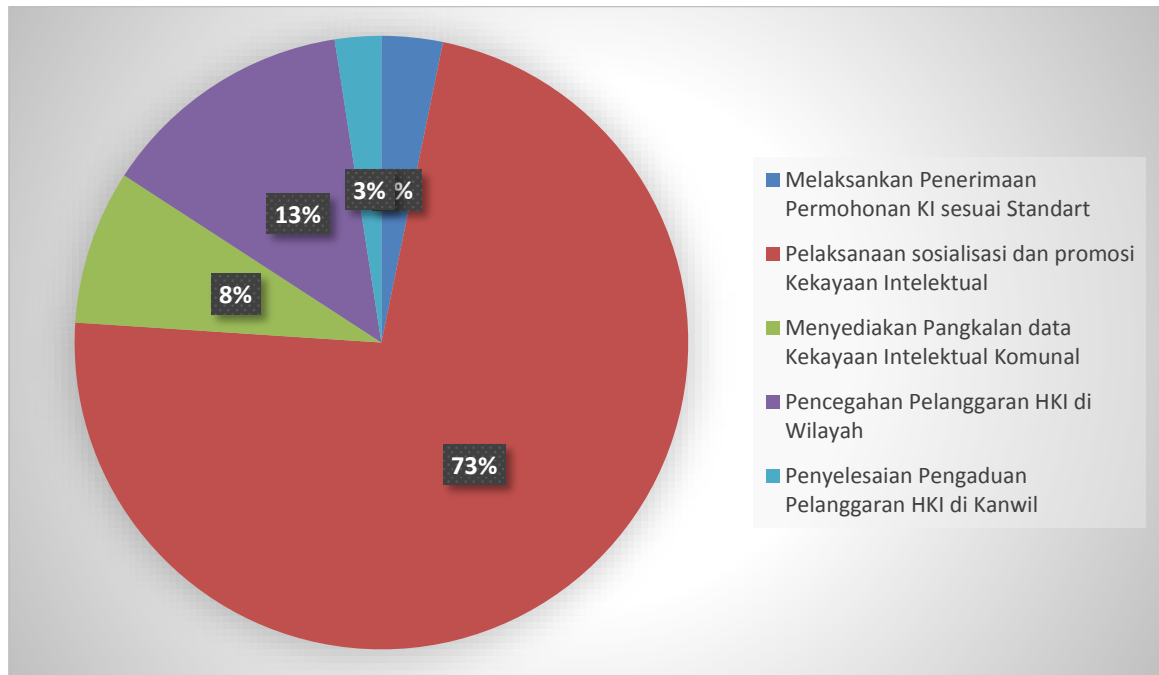
Perbandingan Jumlah PNBP 5 Tahun Terakhir



Sumber : <https://e-kikanwil.dgip.go.id/kanwil/kanwil/permohonan.php>

Jumlah PNBP untuk permohonan merk mencapai Rp 1.025.500,- pada tahun 2017, atau naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 450.600.000,-. Capaian kerja dapat terlaksana 100% tentu saja dapat terlaksana atas dukungan para pihak yang telah bekerja

keras dan bekerja sama dalam pelaksanaan program baik dari dalam maupun dari luar. Semoga apa yang telah kami laksanakan dapat memenuhi apa yang menjadi visi dan misi dari kantor wilayah sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya.



Kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual sebagian besar pada Pelaksanaan sosialisasi dan promosi Kekayaan Intelektual yaitu sebesar 73%. Posisi kedua pada kegiatan Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah sebesar 13%. Pada posisi berikutnya yaitu Menyediakan Pangkalan data Kekayaan Intelektual Komunal sebesar 8%, Melaksanakan penerimaan permohonan KI sesuai standart sebesar 4%, serta Penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil sebesar 3%.

3. Divisi Pemasyarakatan

Mewujudkan Petugas UPT Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI) merupakan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan UPT Pemasyarakatan. Oleh sebab itu untuk merealisasikan rencana dimaksud Divisi Pemasyarakatan melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini sebagaimana fungsi Divisi Pemasyarakatan yakni, Pembinaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasaranan, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2014, Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan berfungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda dan barang rampasan negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan dan;

- d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta membawahi 15 UPT Pemasarakatan yang terdiri dari : 4 Lapas, 4 Rutan, 1 LPKA, 2 Bapas, dan 4 Rupbasan. Kapasitas Lapas/Rutan se-Daerah Istimewa Yogyakarta : 1.920 orang. Isi Lapas/Rutan pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah 1.687 orang, terdiri dari :

- Narapidana Dewasa Laki-laki = 1015 orang
- Tahanan Dewasa Laki-laki = 426 orang
- Narapidana Anak Laki-laki = 22 orang
- Tahanan Anak Laki-laki = 2 orang
- Narapidana Dewasa Perempuan = 98 orang
- Tahanan Dewasa Perempuan = 24 orang
- Narapidana Anak Perempuan = 0 orang
- Tahanan Anak Perempuan = 0 orang

Selama tahun 2017, Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, memberikan layanan pemsarakatan kepada masyarakat dalam bentuk usulan pemberian PB, CB, CMB, dan Asimilasi, sebagai hak warga binaan pemsarakatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Data Usulan Program Reintegrasi

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	129	129
2	CMB	16	15
3	CB	560	558
4	Asimilasi	2	2
5	CMK	0	0
JUMLAH		707	704

Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Divisi Pemasarakatan terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program.

Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 1.687 orang pada tanggal 31 Desember 2017, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 129 orang. Rata-rata perbulan narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan bersyarat sebanyak 11 orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU Subbidang Pembinaan, Bimbingan PAS dan Pengentasan Anak sebanyak 5 orang. Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 4.100.000,- dalam tahun anggaran 2017.

Program usulan cuti menjelang bebas yang dilaksanakan pada Divisi Pemasyarakatan terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 1.687 orang pada tanggal 31 Desember 2017, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 15 orang dari 16 orang yang diusulkan. 1 orang an. Wulan Rizki tidak terealisasi CMB nya karena tidak memenuhi syarat substantif. Rata-rata perbulan narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan cuti menjelang bebas sebanyak 1 orang.

Program usulan cuti bersyarat yang dilaksanakan pada Divisi Pemasyarakatan terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 1.687 orang pada tanggal 31 Desember 2017, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 558 orang dari 560 orang yang diusulkan. 2 orang tidak terealisasi CB nya karena tidak memenuhi syarat substantif yaitu berkelakuan baik selama 6 bulan dan penjamin tidak ada dalam daftar keluarganya. Rata-rata perbulan narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan cuti bersyarat sebanyak 46 orang.

Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

No	Uraian	Tahun		
		31 Des 2015	31 Des 2016	31 Des 2017
1	Pembebasan Bersyarat	183	145	129
2	Cuti Menjelang Bebas	31	29	15
3	Cuti Bersyarat	416	463	558
4	Asimilasi	9	4	2
5	Cuti Mengunjungi Keluarga	-	-	-
JUMLAH		639	641	704

Program pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Divisi Pemasarakatan terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi. Pada tahun 2015 narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 639 orang, Pada tahun 2016 narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 641 orang sedangkan pada 31 Desember 2017 narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB, dan CMK sebanyak 704 orang. Jumlah dari tahun ke tahun cenderung naik sesuai dengan jumlah WBP.

REALISASI ANGGARAN

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan				
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
5252.003	Pembinaan UPT Pemasarakatan [Base Line]				
5252.003.001	Pelaksanaan Kegiatan Pemasarakatan di Divisi Pemasarakatan				
051	Pelaksanaan Kegiatan Pemasarakatan di Divisi Pemasarakatan	63,121,000	60,599,784	2,521,216	96.00%
5252.003.S16	Pembinaan UPT Pemasarakatan di Wilayah Yogyakarta				
051	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Wilayah Yogyakarta	93,071,000	90,486,957	2,584,043	97.22 %
052	Konsultasi Teknis Pemasarakatan	365,084,000	358,325,762	6,758,238	98.15 %
053	Koordinasi Teknis Pemasarakatan	32,291,000	31,798,877	492,123	98.47%
054	Pengendalian UPT Pemasarakatan	210,765,000	207,265,000	3,500,000	98.34%
JUMLAH		764,332,000	748,476,380	15,855,620	97.93%

1. Komponen Pelaksanaan Kegiatan Pemasarakatan di Divisi Pemasarakatan pada Divisi Pemasarakatan dengan pagu Rp. 63.121.000,- telah di realisasikan sebesar Rp.

59.010.665,- dengan sisa sebesar Rp. 4.110.335,- dengan persentase penyerapan sebesar **93,49%** dengan detail :

A. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Telah dilaksanakan kegiatan sidang TPP setiap bulannya.

B. Pemberian Remisi

Telah dilaksanakan kegiatan Pemberian Remisi Umum, Remisi Hari Besar Keagamaan (idul Fitri dan Waisak), Hari Anak Nasional pada tgl. 23 Juli 2017 dan Remisi Natal 25 Desember 2017

C. Pameran

Telah dilaksanakan Pameran Hasil Karya WBP di Pasar Industri Kementerian Perindustrian Jakarta pada bulan April 2017, Pameran Pembangunan Prov DIY di Taman Pintar Yogyakarta pada Bulan Agustus 2017, dan pengiriman Hasil Karya Napi pada bulan Oktober 2017.

2. Komponen Rapat Kerja teknis Pemasyarakatan di Wilayah Yogyakarta pada Divisi Pemasyarakatan dengan pagu Rp. 93.071.000,- telah di realisasikan sebesar Rp. 90.486.957,- dengan sisa sebesar Rp. 2.584.043,- untuk kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tgl 21 s/d 23 Maret 2017 di Ros In Hotel Yogyakarta dengan persentase penyerapan sebesar **97,22%**.

3. Komponen Konsultasi Teknis Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan dengan pagu Rp. 365.084.000,- telah di realisasikan sebesar Rp. 355.763.062,- dengan sisa sebesar Rp. 9.320.938,- dengan persentase penyerapan sebesar **97,45%** dengan detail :

A. Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi Telah dilaksanakan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi di Ros In Hotel pada Bulan Mei 2017 dengan persentase penyerapan sebesar 97,45%.

B. Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada tanggal 15-17 Mei 2017 di Rich Hotel dan Tgl. 11 -13 Juli di Ros In Hotel dengan persentase penyerapan sebesar 98,35%.

4. “Komponen Koordinasi Teknis Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan dengan pagu Rp. 32,291,000,- telah di realisasikan sebesar Rp. 31,798,877,- dengan sisa sebesar Rp. 492,123,- dengan persentase penyerapan sebesar **98,47%** pada 31 Desember 2017”.
- “Komponen Pengendalian UPT Pemasyarakatan pada Divisi Pemasyarakatan dengan pagu Rp. 210,765,000,- telah di realisasikan sebesar Rp. 207.256.000,- dengan sisa sebesar Rp. 3.500.000,- dengan persentase penyerapan sebesar 98.34% pada 31 Desember 2017”.

KEGIATAN TAHUN 2017:

- * Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan tanggal 21 s/d 23 Maret 2017 di Hotel Ross In Yogyakarta;
- * Apel Siaga, Kami PASTI Bersih Melayani di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
- * Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) 2017 Kementerian Hukum dan HAM RI Pelaksanaan Pameran 4 s.d. 8 April 2017 Tempat pameran di Plasa Industri, Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan;
- * Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Terkait Pelaksanaan Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi Secara Online Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Pelaksanaan 08 s.d. 10 Mei 2017 Hotel Ros In Yogyakarta;
- * Pameran Pembangunan DIY Tahun 2017 Pelaksanaan Pameran 18 s.d. 22 Agustus 2017 Tempat pameran di Gedung Kotak Taman Pintar Yogyakarta Panitia Pameran Pembangunan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY
- * Kegiatan Koordinasi Teknis Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan Baran Waktu : 11 s/d 13 Juli 2017 Tempat : ROS IN HOTEL Yogyakarta;
- * Melaksanakan Konsultasi Teknis Pemasyarakatan tentang SDP online dan Remisi Online Tanggal: 16-18 Mei 2017 Peserta: 35 Orang Tempat: Ross In Hotel Yogyakarta;



Konsultasi Teknis Pemasarakatan di Hotel Ross IN Yogyakarta

**DATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY
TAHUN 2017**

NO	SATKER	TAHANAN	NAPI	TOTAL	KAPASITAS	%
1	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	11	347	358	496	72
2	LAPAS KELAS II B SLEMAN	124	139	263	196	134
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	49	212	261	565	46
4	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	80	90	170	231	74
5	RUTAN KELAS II B BANTUL	78	76	154	127	121
6	RUTAN KELAS II B WATES	35	28	63	70	90
7	RUTAN KELAS II B WONOSARI	34	116	150	75	200
8	LPKA YOGYAKARTA	2	69	24	35	69
9	LPP YOGYAKARTA	23	98	122	125	98
JUMLAH		436	1.129	1.565	1.920	82

sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id> tanggal 9 Januari 2017

Dari table diatas dapat dilihat bahwa terdapat tiga UPT di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang mengalami over kapasitas yakni : Lapas Kelas IIB Sleman sebesar 134%, Rutan Kelas IIB Bantul 121%, dan Rutan Kelas IIB Wonosari 200%.

**DATA LUAS TANAH DAN BANGUNAN
UPT PEMASYARAKATAN TAHUN 2017**

NO	SATKER	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)
1	BAPAS KLAS II WONOSARI	1,000	452
2	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	24,300	8,553
3	LAPAS KELAS II B SLEMAN	10,640	4,028
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	30,176	9,869
5	RUPBASAN KLAS II BANTUL	1,700	359
6	RUPBASAN KLAS II WATES	1,019	400
7	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	6,105	3,620
8	RUTAN KELAS II B WATES	5,216	2,646
9	RUTAN KELAS II B WONOSARI	58,035	5,143

sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id> tanggal 22 Desember 2017



4. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. Untuk merealisasikan fungsi tersebut dan upaya pencapaian kinerja tahun 2017, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan yang sebelumnya sudah tercantum didalam perjanjian kinerja pada awal tahun 2017.

Kegiatan Divisi Keimigrasian yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, diantaranya;

No	Kegiatan	Waktu/tempat/ Peserta
1.	Koordinasi dan konsultasi Pelayanan Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji Th.1438 H/ 2017M.	Tanggal 23 Februari 2017 di Kantor Wilayah Kemenag D.I. Yogyakarta. Peserta dari Divisi Keimigrasian dan Kemenag.
2.	Koordinasi dan Konsultasi Pencegahan TKI Non Prosedural.	Tanggal 28 Februari 2017 di Kantor Disnakertran D.I. Yogyakarta. Peserta dari Divisi Keimigrasian dan Disnakertrans Yogyakarta.
3.	Koordinasi dan Konsultasi Pencegahan TKI Non Prosedural.	Tanggal 13 Maret 2017 Tempat : Polda D.I. Yogyakarta. Peserta : Tim dari Divisi Keimigrasian dan 2 (dua) orang dari Polda D.I. Yogyakarta.
4.	Koordinasi dan Konsultasi TKI Non Prosedural.	Waktu : 21 Maret 2017 Tempat : Kantor BP3TKI D.I. Yogyakarta Peserta : TIM dari Divisi Keimigrasian dan 2 (dua) Orang dari BP3TKI.
5.	Kegiatan Koordinasi dan Bimbingan	Waktu : 12-17 Mei 2017

	Teknis Penanganan Permasalahan WNI di LN untuk Pemangku Kepentingan di Daerah.	Tempat : Hotel Grand Candi Semarang. Peserta : 6 (enam) propinsi pemangku kepentingan yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
6.	Operasi Gabungan Tim Pora Kanwil Kemenkumham DIY	Senin,10 April 2017 di Kanwil Kemenkumham DIY dilanjutkan Operasi Gabungan Wilayah hukum DIY. Peserta Divisi Imigrasi, Kanim Yogya dan Instansi terkait.
7.	Representasi Perpres 125 tentang pengungsi dari luar negeri di Ruang Divisi Imigrasi	Pada hari; Kamis,13 April 2017 di Ruang Divisi Imigrasi Kemenkumham DIY. Peserta Divisi Imigrasi.
8.	Pelayanan Imigran Ilegal/Pengungsi dan Pengawasan Orang Asing di Asrama Haji Transit Yogyakarta	Senin,17 April 2017 di Asrama Haji Transit Jl. Ring Road Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman , Yogyakarta. Petugas; Divisi Imigrasi
9.	Koordinasi ke Kemenag perihal TKI Nonprosedural	Pada hari; Kamis,27 April 2017 di Kantor Kemenag d/a jln. Sukonandi, Yogyakarta. Peserta; Divisi Imigrasi dan Petugas Kemenag.
10.	Pelayanan Imigran Ilegal/Pengungsi dan Pengawasan Orang Asing di Asrama Haji Transit Yogyakarta	Jumat,28 April 2017 di Asrama Haji Transit Jl. Ring Road Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman , Yogyakarta.Petugas; Divisi Imigrasi
11.	Rapat persiapan ke Ditjenim perihal KITAS Elektronik dan pembayaran ijin tinggal melalui sitem SIMPONI	Jumat, 28 April 2017 di Ruang Divisi Imigrasi Kemenkumham DIY Peserta; Divisi Imigrasi.
12.	Pelayanan Imigran Ilegal / Pengungsi dan Pengawasan Orang Asing di Asrama Haji Transit Yogyakarta	Rabu, 03 Mei 2017 di Asrama Haji Transit Petugas; Divisi Imigrasi
13.	Operasi Gabungan Tim Pora Kanwil Kemenkumham DIY	Pada hari; Selasa, 16 Mei 2017 di Aula Kanwil Kemenkumham DIY. Peserta; Divisi Imigrasi, Kanim Yogya dan Instansi terkait.
14.	Penanganan awal Imigran Ilegal di pesisir selatan pantai Glagah dan Koordinasi dengan Pemda Kulon Progo	Pada hari; Rabu,24 Mei 2017 di Desa Glagah, Kec. Temon, Kab.Kulon Progo Peserta ; Divisi Imigrasi.
15.	Rapat Bindalwasnis ke Kanim Yogyakarta	Pada hari; Jumat,26 Mei 2017 di Aula Kantor Imigrasi Yogya Jln. Solo Km. 10, Maguwoharjo, Yogyakarta. Peserta; Kanim dan Divisi Imigrasi.
16.	Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dan Pengadilan Tipikor DIY	Pada hari; Senin, 29 Mei 2017 di Kantor Kejati DIY Jln.Sukonandi, No.4, Mlati

		Pengadilan Tipikor DIY. Peserta;Divisi Imigrasi dan Kejaksaan Tinggi DIY.
17.	Koordinasi persiapan Ekstradisi WNA Afganistan dengan LP Kelas IIB Sleman.	Pada hari; Selasa,13 Juni 2017 di LP Kelas II B Sleman d/a Jln.Cebongan,Bedingan,Sumberadi, Mlati, D I Yogyakarta. Peserta;Divisi Imigrasi dan Anggota LP Kelas II B Sleman.
18.	Koordinasi dengan Polda DIY perihal persiapan Ekstradisi WNA Cekoslovakia	Pada hari; Kamis,15 Juni 2017 di Polda DIY d/a Jln/Ring Road Utara,Condong Catur,Depok,Sleman,Yogyakarta.Peserta;Divisi Imigrasi,Anggota Polda DIY dan BINDA DIY
19.	Koordinasi ke Pesisir Pantai Selatan dan Pengawasan Orang Asing	03 April 2017, di Pantai Baron, Gunungkidul, diikuti Pejabat Struktural Divisi Keimigrasian
20.	Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)	05 April 2017, di R. Rapat Kanwil Kemenkumham DIY, diikuti anggota Timpora
21.	Koordinasi dan Konsultasi terkait pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP).	Waktu : 13 Juli 2017 Tempat : Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta Peserta : Pejabat Struktural dan JFU Divisi Keimigrasi
22.	Pendataan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terhadap tamu hotel, penginapan, wisma, homestay.	Waktu : 23-25 Agustus 2017 Tempat : Hotel Airlangga, Duta Guest House, wisma Gajah, Hotel Pramesthi, Hotel The Grand Palace, Hotel Burza, Hotel Ros In, Wisma Ananda. Peserta : 2 (dua) orang Pejabat Struktural Divisi Keimigrasian 2 (dua) orang JFU Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
23.	Koordinasi dan konsultasi rencana pendirian Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Bandar Udara Baru.	Waktu : 04 September 2017 Tempat : Kantor Bupati Kulon Progo Peserta : Pejabat Struktural dari Divisi Keimigrasian (7orang).
24.	Pengawasan Orang Asing di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta	Pada hari;Kamis,27 Juli 2017 di Hotel Royal Ambarukmo d/a Jln.Laksda.Adisucipto No.81,Depok,Sleman,Yogyakarta.Petugas; Divisi Imigrasi
25.	Bimtek Pendeteksian Paspor Palsu oleh Kedubes USA dari Jakarta di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta.	Pada hari; Senin-Selasa ,18-19 September 2017 di Hotel Royal Ambarukmo d/a Jln.Laksda.Adisucipto No.81, Depok ,

		Sleman, Yogyakarta.Peserta;Kepolisian DIY, Divisi Keimigrasian DIY dan Kanim Yogyakarta.
26.	Koordinasi dalam Rangka Pembukaan Pembatas Jalan / Devider	Waktu : 04 Oktober 2017 Tempat : Perhubungan Darat Prov. Yogyakarta Peserta : Tim dari Divisi Keimigrasian terdiri dari Pejabat Struktural dan JFU berjumlah 7 orang
27.	Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama dan Pendataan Penguatan Tugas dan Fungsi Keimigrasian Bidang Lalu Lintas dan Intaltuskim pada Universitas di Wilayah Yogyakarta	Waktu : 21 November 2017 Tempat : - Univ. UNY - Univ. UGM Peserta : 4 (empat) orang Pejabat Struktural Divisi eimigrasian 3 (tiga) orang JFU pada Divisi Keimigrasian
28.	Study Banding ke ULP, TPI Bandara Adi Sumarmo dan Kanim Kelas I Surakarta.	Waktu : 08 s/d 09 Des 2017 Tempat : ULP, TPI Bandara Adi Sumarmo dan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta. Peserta : Tim dari Divisi Keimigrasian beserta Pejabat Struktural dan JFU berjumlah 4 (empat) orang.
29.	Kegiatan Publik Awareness Campaign Dukungan Pencegahan WNI Bermasalah Saudi Arabia.	Waktu : 16 Des 2017 Tempat : BP3TKI D.I Yogyakarta. Peserta : Tim dari Divisi Keimigrasian dan beserta Pejabat Struktural berjumlah 5 (lima) orang.
30.	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsionalis Analisis Keimigrasian Dan Pemeriksa Keimigrasian di Kanim Yogyakarta	Pada hari, Kamis,05 Oktober 2017 bertempat di Aula Kanim Yogyakarta d/a Jln.Solo Km.10 Maguwoharjo,Yogyakarta,Peserta;Kanim Pati,Kanim Wonosobo,Kanim Pemalang,Kanim Semarang,Kanim Surakarta,Kanim Yogyakarta dan Divisi Imigrasi DIY
31.	Monitoring Dan Evaluasi Bidang Inteldakinsarkomkim	Pada hari, Selasa,10 Oktober 2017 bertempat di Aula Kanim Yogyakarta d/a Jln.Solo Km.10, Maguwoharjo,Yogyakarta,Peserta;Divisi

		Imigrasi Dan Kanim Yogyakarta
32.	Pengawasan orang asing di PT.Hana Tour Jogja di Sleman, Yaogyakarta	Pada hari; Rabu,11 Oktober 2017 di PT.Hana Tour Jogja d/a Hotel Merapi Merbabu Lantai 3 Jln.Seturan Raya, Depok, Sleman, Yogyakarta. Petugas;Divisi Imigrasi
33.	Pengawasan WNA di PT.Sumbawang Superior	Pada hari Kamis,12 Oktober 2017 di Panggunharjo,Sewon,Bantul,Yogyakarta.Petugas dari Divisi Imigrasi.
34.	Pengawasan Orang asing di PT.Borda Indonesia.	Pada hari;Jumat,13 Oktober 2017 di PT.Borda Indonesia d/a Jln.Kaliurang Km.6,6 ,176 Condongcatur Depok, Sub District Sleman Regency,DIY 55281 Petugas;Divisi Imigrasi.
35.	RDK Tim Pora	Pada Hari Selasa,24 Oktober 2017 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham DIY d/a Jln.Gedongkuning No.146 Banguntapan,Yogyakarta.Peserta;Divisi Imigrasi,Kanim Yogyakarta dan Instansi terkait anggota Tim Pora DIY.
36.	Operasi Gabungan	Pada Hari Rabu,25 Oktober 2017 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham DIY d/a Jln.Gedongkuning No.146 Banguntapan,Yogyakarta.Peserta; Divisi Imigrasi,Kanim Yogyakarta dan Instansi terkait anggota Tim Pora DIY.
37.	Pengawasan Orang Asing di PT.Anugerah Mulia Indobel Yogya	Pada hari;Jumat, 03 Nopember 2017 di PT.Anugerah Mulia Indobel d/a Jln Dalem KG III/978,Purbayan, Kotagede, Yogyakarta DIY.Petugas; Divisi Imigrasi
38.	Pengawasan Orang Asing di PT.Bamboo Nusa Verde Yogyakarta	Pada hari;Kamis, 06 Nopember 2017 di PT.Bamboo Nusa Verde d/a Jln.Mangunan,Pakem,Tebonan,Harjobinangun, Pakem,Sleman, Yogyakarta.Peserta; Divisi Imigrasi.
39.	Pengawasan Orang Asing di PT.Takii Seed Indonesia,Yogyakarta	Pada hari; Selasa,07 Nopember 2017 Pengawasan Orang Asing di PT.Takii Seed Indonesia,Yogyakarta d/a Jln.Kaliurang Km.17,5,Padasan, Pakem,Sleman,Yogyakarta.Peserta; Divisi Imigrasi.

40.	Koordinasi Dan Pengawasan Orang Asing di Pantai Pesisir Selatan Kulon Progo.	Pada hari; Rabu, 08 Nopember 2017 di Pantai Glagah dan Kecamatan Galur d/a Kecamatan Galur, Kabupaten Kuon Progo, DIY, Peserta;Divisi Imigrasi.
41.	Pengawasan Orang Asing di PT.Anugerah Mulia Sentosa	Pada Hari; Kamis,09 Nopember 2017 di PT.Anugerah Mulia Sentosa d/a Bangunjiwo,Kasih, Bantul, DIY, Petugas;Divisi Imigrasi
42.	Bindalwasnis ke Kanim Yogyakarta	Pada Hari; Jumat,10 Nopember 2017 di Ruangan Aula Kanim Yogyakarta,Acara Bindalwasnis, Peserta; Dari Divisi Imigrasi Dan Kanim Yogyakarta
43.	Koordinasi Dan Pengawasan Orang Asing di Pantai Pesisir Selatan Gunung Kidul	Pada Hari;Senin, 13 Nopember 2017 di Desa Girikarto, Gunung Kidul d/a Girikarto, Panggang,Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Peserta; Divisi Imigrasi
44.	Koordinasi Bidang Inteldakinsarkomkim dengan Kanim Surakarta	Pada Hari;Kamis,16 Nopember 2017 di Kanim Surakarta,Dalam Rangka Koordinasi, Peserta Dari Kanim Surakarta dan Divisi Imigrasi
45.	Rapat Persiapan RDK dan RDK Tim PORA Kanwil Kemenkumham DIY	Pada Hari;Jumat,17 Nopember 2017 di Ruangan Divisi Imigrasi,Acara Rapat Persiapan RDK Tim Pora dan Rapat RDK Tim Pora Kanwil Kemenkumham DIY,Peserta; dari Divisi Imigrasi Dan Instansi terkait anggota Tim Pora.
46.	Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)	17 November 2017, di Ruang Divisi Keimigrasian, diikuti Anggota TIMPORA
47.	Koordinasi dan Peninjauan ke ULP Bantul	30 November 2017, di Kecamatan Kasihan, Bantul, diikuti Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum
48.	Public Awareness Campaign (PAC) tentang WNI Bermasalah di Arab Saudi	16 Desember 2017, di Kantor BP3TKI Yogyakarta, diikuti Pejabat Struktural
49.	Koordinasi Bidang Inteldak dan Insarkomkim ke Kantor Imigrasi	17-18 Desember 2017, Di Wonosobo, diikuti Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional

	Wonosobo	Umum
50.	Pengawasan Orang Asing ke Hotel JW Marriot Yogyakarta	20 Desember 2017, di Sleman, diikuti Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum



Rapat Timpora 16 Mei 2017

Selain berbagai kegiatan diatas, Divisi Keimigrasian juga memberikan layanan keimigrasian dalam hal pemberian rekomendasi- rekomendasi perpanjangan dokumen Keimigrasian (KITAP, KITAS dll), Penerimaan/permohonan Dokim (Paspor, Stiker VOA, KITAS) dan Perdim dari Ditjenim ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DIY sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*). Pendistribusian Paspor, Stiker VOA, KITAS, dan Perdim dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, kemudian diteruskan ke Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*, serta Terlaksananya penggunaan dan pelaporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

STATISTIK PELAYANAN KEIMIGRASIAN WNI JAJARAN DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2017

JENIS PASPOR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
24 Hal	148	156	224	176	285	243
48Hal	5263	5224	4713	5847	3575	2422
Jumlah	5411	5380	4937	6023	3860	2665

JENIS PASPOR	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DEC
48 Hal	322	373	142	251	243	211
24 Hal	4102	3924	3104	4688	4032	2756
Jumlah	4424	4297	3246	4939	4275	2967

PENGHARGAAN TAHUN 2017

Sebagai langkah nyata dalam penyelenggaraan e-government dan transparansi informasi kepada publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta di tahun 2017 ini mendapat penghargaan sebagai Kantor Wilayah dalam terbaik pengelolaan website.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta meraih beberapa penghargaan di bidang keuangan, antara lain Peringkat ke II Penilaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tingkat UAPPA-W,



Peringkat II Penilaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UA PPA-W



Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UA PPA-W



Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bantul Peringkat Ke-II Satker Pengelola Kinerja Terbaik Semester I TA 2017 untuk kategori Pagu Kurang dari Rp. 7,5M

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

1. Pengantar

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang undangan (Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), yang menjalankan visi Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum dan Misi Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

1. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
 2. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
 3. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
 4. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- serta
5. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

telah melakukan Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

Sejak itu, reformasi birokrasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan baik dan terus bekerja seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja dalam upaya peningkatan pelayanan.

Program Reformasi Birokrasi yang dilakukan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta melalui program kerja meliputi 8 (delapan) area perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta sesuai dengan 8 Area Perubahan dan Monitoring & Evaluasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2017.
2. Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi.
3. Pelaksanaan rapat kerja Tim Reformasi Birokrasi Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Monev Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 telah dilakukan terhadap 17 satuan kerja meliputi :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta
2. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman
6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul

8. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
9. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari
10. Bapas Kelas I Yogyakarta
11. Bapas Kelas II Wonosari
12. Rupbasan Kelas I Yogyakarta
13. Rupbasan Kelas II Bantul
14. Rupbasan Kelas II Wates
15. Rupbasan Kelas II Wonosari.
16. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta
17. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta

2. Evaluasi Terhadap Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

Berikut capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta:

No	Program, uraian Program	Evaluasi Seluruh Satuan Kerja	Data Dukung
I	Manajemen Perubahan		
1	Tim Reformasi Birokrasi		
a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi (Satgas 8 area perubahan)	SK Tim Reformasi Birokrasi
b	Tim RB telah menyusun rencana kerja dan pelaksanaan sesuai rencana yang ditetapkan	Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	Dokumen Rencana Kerja Tim RB dan Laporan Kegiatan RB
c	Tim RB telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut	rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Dokumen Evaluasi dan tindak lanjut
2	Road Map Reformasi Birokrasi		
a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map Kementerian Hukum dan HAM telah diintegrasikan dan disusun kedalam Road Map Unit Eselon I, dan Kanwil serta ditetapkan sebagai dokumen formal	Road Map Eselon I dan Kanwil mengacu Road Map Kementerian ditetapkan dengan SK Pimpinan Unit Eselon I dan Kanwil

b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	tidak ada	Road Map Unit Eselon I mengacu Raod Map Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Membuat Rencana Kerja Mengacu pada Road Map Unit Eselon I terkait
c	Road Map telah mencakup "quick win"	Belum ada quick win pada tingkat Kantor Wilayah	Quick Win Satuan Kerja WBK/WBBM
d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map	Penyusunan Road Map melalui Pembahasan Seluruh Tim Satgas Reformasi Birokrasi untuk Tingkat Kementerian Hukum dan HAM , Unit Eselon I
e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	Kegiatan Sosialisasi/Internalisasi Road Map pada seluruh pegawai pada Unit Eselon I, dan Kanwil pada seluruh UPT dan para pegawai secara berjenjang)
3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		
a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	Laporan Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perTriwulan, Semesteran, Tahunan (% capaian dari masing-masing area perubahan/Proses) dilakukan oleh unit eselon I
b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	Laporan Kegiatan Kemajuan Reformasi Birokrasi Per triwu- lan, Semesteran dan Tahunan (dilakukan oleh Unit Eselon I)
c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan (pada tingkat eselon I)	Sosialisasi Tim Asesor untuk Tingkat Unit Eselon I
d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada pada tingkat	Pimpinan Unit Eselon I dan Ka. Kanwil Menetapkan SK . Tim Asistensi Asesor

		Kantor Wilayah.	dengan melibatkan Pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.
e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan revidi terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	Koordinator assessor belum melakukan revidi kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	Surat Tugas Tim Pendampingan Penilaian dan Evaluasi PMPRB pada unit eselon I,
f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;	Undangan Pembahasan Penilaian, Tanda Tangan LKE RB
g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun berikut
4	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		
a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SK Tim Reformasi Birokrasi
b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala	Apel Pimpinan dan Pegawai, Media Elektronik, Website,
II	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Harmonisasi		
a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	Identifikasi, analisis, dan pemetaan telah dilakukan terhadap sebagian perda dan peraturan kepala daerah, hal ini disebabkan belum semua penyusunan produk hukum daerah melibatkan kantor

			wilayah Kemenkumham DIY
b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai	Dari seluruh produk hukum daerah yang telah diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, belum sepenuhnya di tindaklanjuti oleh Pemda.
2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan		
a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan	Sistem pengendalian penyusunan perda dan peraturan kepala daerah sudah disusun dengan dtetapkannya perda tentang tatacara penyusunan produk hukum daerah di tiap kabupaten, beberap belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011
	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Evaluasi atas pelaksanaan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan karena kegiatan tersebut belum ada regulasi yang mengatur secara rinci tentang evaluasi sistem tersebut
III	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1	Evaluasi		
a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi	Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB, Usulan restrukturisasi organisasi hasil evaluasi Orta Kanwil Kumham 2014

b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi	Orta Kanwil Kumham 2014
c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja	Orta Kanwil Kumham 2014
d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja	Orta Kanwil Kumham 2014
e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja	Orta Kanwil Kumham 2014
f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja	Orta Kanwil Kumham 2014
g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	Orta Kanwil Kumham 2014
h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Orta Kanwil Kumham 2014

i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Orta Kanwil Kumham 2014
2	Penataan		
a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Orta Kanwil Kumham 2014
IV	PENATAAN TATALAKSANA		
1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama		
a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	print screen peta proses bisnis Kanwil
b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	SOP kegiatan Utama dari uraian Jabatan (Jabatan dari Peta Bisnis proses
c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	Seluruh SOP telah diterapkan pada pegawai penanggungjawab atas kegiatan dalam Tugas dan fungsinya.
d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	Laporan evaluasi atas terjadinya perubahan proses bisnis dan prosedur orasional disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan kebijakan (Dokumen undangan, notulen, usulan perubahan proses bisnis)
2	E-Government (2)		
a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Print Screen TNDE, SIMPEG, Dokumen LPSE, e-monev, Program Aksi, SKP online dan SIAP

b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government terintegrasi	Laporan SIAP, data isian pada aplikasi SIAP pada website Kemenkumham, serta dokumen RKA-KL, .
c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government terintegrasi	Print Screen website terintegrasi berupa pengaduan melalui aplikasi LAPOR mulai tahun 2014, pengaduan LPSE sejak tahun 2011, layanan website : <i>kemenkumham.go.id</i> .
d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government terintegrasi	Sekretariat Jenderal sebagai fasilitator terkait implementasi pengintegrasian landing page website Kemenkumham untuk layanan AHU, Imigrasi, HKI. Sesuai SK Nomor : SEK.02.TI.01.05 Tahun 2014 Tentang pembentukan Tim Pengembangan SIM Telematika
3	Keterbukaan Informasi Publik		
a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Adanya Permenkumham Nomor : M.HH-04.IN.04.02 tahun 2011 ttg Tatacara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM
b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Seluruh informasi publik telah dapat diakses	
c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala	Dilakukan monev Tahun 2017
V	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi		

a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan	
b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi	
c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	
d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	
e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi	
2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN		
a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb)	Melalui situs http://ssc.bkn.go.id
b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (<i>online</i>)	Ya, pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Pendaftaran on line melalui situs http://ssc.bkn.go.id
c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Print Screen Pengumuman penerimaan CPNS melalui website : http://cpns.kemenumham.go.id
d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, Proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	halaman website http://cpns.kemenumham.go.id .
e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Persyaratan tercantum dalam halaman website http://cpns.kemenumham.go.id .

3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		
a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan	Adanya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
b	Telah dilakukan asesment pegawai	Telah dilakukan asesment kepada seluruh pegawai	Laporan pelaksanaan/ panggilan /usulan assesment pegawai/ Para Pejabat di lingkungan Kanwil Kumham DIY
c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Dokumen /Laporan Hasil Identifikasi Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Kanwil Kumham DIY
d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi	KAK dan postur pengembangan kompetensi telah terakomodir dan terintegrasi dengan BPSDM dalam RKA KL.
e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	surat usulan pengembangan pegawai ke BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, LAN, BAPPENAS serta Institusi terkait lainnya sesuai postur anggaran Tahun 2017
f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Laporan Monev Pengembangan Pegawai unit EselonI, Kanwil sesuai postur anggaran Tahun 2017 ke BPSDM.
4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka		
a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Kebijakan promosi terbuka melalui Keputusan Menkumham No. M.HH.01.KP.05.02 tahun 2014 ttg. Pembentukan Pansel PIMTI Madya Kemenkumham. Sedangkan kebijakan promosi internal adalah pengisian jabatan administrator melalui

			mekanisme open bidding.
b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional	Telah diumumkan proses penjarangan calon pimpinan tinggi madya melalui website : http://kemenkumham.go.id dan diinformasikan ke pimpinan Lembaga Non Kementerian, dan Sekjen Kementerian dan 5 Rektor Perguruan Tinggi Negeri.
c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Laporan kegiatan seleksi terbuka Jabatan Kosong pada Unit Eselon I, Kanwil dan pengusulan ke Sekjen sesuai Ketentuan yang berlaku.
d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Laporan promosi terbuka dan seleksi pada unit eselon I, Kanwil dan di usulkan ke Sekjen sesuai ketentuan berlaku.
e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Hasil Penetapan dengan SK. Sekjen/ SK. Menteri Kumham sesuai ketentuan yang berlaku Diumumkan dalam website Kementerian Hukum dan HAM.
V	Penetapan kinerja individu		
a	Penerapan Penetapan kinerja individu	Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai	Seluruh pegawai pada Unit Eselon I, Kanwil dan UPT dilingkungan Wilayah kerjanya telah menetapkan kinerja individunya melalui SKP (contoh SKP terlampir).
b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Tersusunnya penilaian kinerja individu pegawai (contoh PPKP terlampir)

c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	Tersusunnya ukuran kinerja individu berdasarkan penjabaran dari uraian tugas organisasi dan IKU (contoh terlampir).
d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013.
e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian kinerja individu
f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Tim Baperjakat yang melaksanakan fungsi sebagai Tim penilai kinerja pegawai (Laporan evaluasi kinerja individu dan laporan pengembangan karir, Diklat pegawai)
g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	Telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 22 Tahun 2014 ttg Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Dok Laporan penerimaan Tunjangan Kinerja)
6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		
a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS dilingkungan Kemenkumham

b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	Laporan Pelanggaran Kode Etik, Laporan Rekap Pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin, Pemotongan tunjangan Tahun 2016 berdasarkan PermenkumHAM No. 22 Tahun 2014.
c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala	Dilakukan monev melalui SE Sekjen No. SEK6 UM.01.01-32 tahun 2015 tentang Evaluasi Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore. (Laporan Evaluasi terhadap pegawai yang melanggar kode etik, pelanggaran disiplin pegawai pertrwulan, persemester, tahunan yang menunjukkan
d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi	Telah dilakukan pengaturan pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM .
7	Pelaksanaan evaluasi jabatan		
a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Print Screen SIMPEG pada unit eselon I, Kanwil Kemenkumham yang menyajikan data pegawai sejak pegawai tersebut CPNS sampai dengan pensiun. (Capture aplikasi terlampir)
b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Tersedia fasilitas e_kepegawaian dan SIMPEG yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dan admin melalui login menggunakan password. (Print Screen)
c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	Print Screen Telah dilakukan up date SIMPEG oleh admin unit masing-masing setiap terjadi

			perubahan data pegawai.
d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Adanya kebijakan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK.2.KP.07.01 -730 ttg penggunaan SIMPEG Kemenkumham dalam Pengambilan Kebijakan
VI	PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1	Keterlibatan Pimpinan		
a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Dokumen Kumham renstra 2015-2020
b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen penetapan kinerja
c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pemantauan dilakukan secara berjenjang melalui penyusunan SKP dan melalui formulir kendali kerja harian.
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)		
a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Usulan Diklat AKIP, Panggilan Peserta Diklat AKIP Peningkatan dilakukan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Pelatihan Akuntabilitas Kinerja (Sertifikat terlampir)
b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Telah disusun Pedoman Penyusunan LAKIP dan diformalkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Penyusunan Pedoman Penyusunan LAKIP Kemen Hukum & HAM
c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi	Sudah terdapat aplikasi pengukuran kinerja, tetapi belum terimplementasikan

			sebagai alat pengambil kebijakan. (Modul aplikasi e Kumham)
d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi	Print screen SKP berbasis elektronik
e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan	Laporan Proksi Tahun 2017 (E- Monev UKP 4)
VII	PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Gratifikasi		
a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	SK Kakanwil Kumham DIY Tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi
b	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	Public campaign telah dilakukan secara berkala	Dokumen Penandatanganan para pimpinan dan Para Pejabat terhadap Komitmen Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dan sosialisasi
c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Laporan Penerimaan Gratifikasi (sekalipun Nihil)
d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan monev Tahun 2017 dilakukan
e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya terdapat laporan tindak lanjut	Laporan monev Tahun 2017 dilakukan
2	Penerapan SPIP		
a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, ada peraturan organisasi tentang SPIP	Permenkumham No. 33 Tahun 2013
b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian	Laporan terdapat di Laporan Target Kinerja
c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko	Laporan terdapat di Laporan Target Kinerja
d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Laporan terdapat di Laporan Target Kinerja

e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Dokumen Sosialisasi SPIP dan Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan asesment /Pemetaan Resiko
f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	Laporan Monev terhadap Peta Resiko apakah telah efektif atau ada perbaikan pengendalian sesuai perubahan kebijakan
3	Pengaduan Masyarakat		
a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	SK Kakanwil Kumham DIY Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan pada kanwil Kumham DIY
b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Telah diimplementasikan Melalui sarana yankomas, media website, LAPOR, dan media lain.
c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Rekapitulasi pengaduan & tindak lanjut nya Tahun 2017.
d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	
e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	
4	Whistle-Blowing System		
a	Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>	Ya, terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	SK Kakanwil DIY Tentang Pembentukan TIM Penanganan Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing) pada Kanwil Kemenkumham DIY
b	<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan	c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi	Laporan Sosialisasi whistle blowing
c	<i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan	Ya, kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Laporan ada pada ITJEN terbitnya SK Kakanwil DIY Tentang Pembentukan TIM

			Penanganan Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing) pada Kanwil Kemenkumham DIY
d	Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan ada pada ITJEN tentang Whistle Blowing
e	Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Laporan ada pada ITJEN tentang Whistle Blowing
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Dokumentasi Sosialisasi Kode Etik Imigrasi, Terdapat pada Dokumen Pakta Integritas, Dokumen Pengadaan Barjas.
b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	Sosialisasi kegiatan penanganan benturan kepentingan melalui kegiatan coffee morning
c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Dokumentasi Sosialisasi Kode Etik Imigrasi, Terdapat pada Dokumen Pakta Integritas, Dokumen Pengadaan Barjas.
d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	dilakukan, evaluasi Penanganan tentang Benturan kepentingan
e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	dilakukan, evaluasi Penanganan tentang Benturan Kepentingan
6	Pembangunan Zona Integritas (Wilayah ITJEN)		
a	Telah dilakukan penancangan zona integritas	Ya terdapat Dokumen Pencanaan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	SK Kakanwil DIY Tentang Pembentukan TIM Pengendalian Gratifikasi pada Kanwil Kemenkumham DIY
b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	SK Kanwil Kumham tentang WBK dan WBBM
c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif	SK Kakanwil DIY Tentang Pembentukan TIM Pengendalian Gratifikasi pada Kanwil Kemenkumham DIY

d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Rekapitulasi hasil pemantauan Reformasi Birokrasi
e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”	Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	Penunjukan Kanim Kelas I Yogyakarta dan Kanwil Yogyakarta sebagai wilayah menuju WBK dan WBBM
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	
b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	Laporan Triwulan, Laporan Tahunan Rekapitulasi Kehadiran Apel
c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran	DIPA Kanwil 2017
d	APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko	Dinilai oleh Irjen
VIII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Standar Pelayanan		
a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Dokumen Kebijakan Standar Pelayanan pelayanan (Pas, Imigrasi, AHU, HKI, Pelayanan Hukum)
b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	Dokumen Maklumat Standar Pelayanan terlampir
c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan	Dokumen SOP Pelayanan Publik Pas, Imigrasi, AHU, HKI, Pelayanan Hukum)
d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu & perbaikan atas standar pelayanan secara berkala& dilakukan dg melibatkan stakeholders	Tidak ada Perubahan SOP pada Kanim Imigrasi

e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala	Tidak ada Perubahan SOP pada Kanim Imigrasi
2	Budaya Pelayanan Prima (1)		
a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Dokumen sosialisasi dan atau kegiatan pembinaan perilaku pegawai dalam memberikan layanan , dan pelaksanaan TUSI sesuai Budaya Kerja " Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Iklas dan Taqwa"
b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	Print Screen Pelayanan Publik telah berbasisi online
c	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan	Dokumen SK. Hukdis dan usulan Hukdis terhadap petugas Pelayanan yang melakukan pelanggaran dan kode Etik
d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	Dokumen dan Foto lokasi Pelayanan Terpadu
e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Dokumen usulan inovasi pelayanan, law center, ijin riset, yankomas
3	Pengelolaan Pengaduan		
a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Melalui media website LAPOR, pengaduan layanan barjas.
b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif	SOP utk pengaduan mekanisme LAPOR mengacu pd UKP4. Pengaduan dengan mekanisme PPID sudah terdapat di web jogja.kemenkumham.go .id,

c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Yankomas, Kotak Kepuasan pengunjung
d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Data pengaduan dan tindak lanjutnya Tahun 2017
e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	Belum ada
4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		
a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala	Dokumen Laporan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat pada unit kerja Eselon I yang melaksanakan pelayanan publik dan pelayanan pemasyarakatan, pelayanan bidang hukum
b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Print Screen Hasil survei masyarakat diakses terbuka dalam web. kanwil
c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat	ada Dokumen Laporan Perbaikan Pelayanan Publik berdasarkan hasil survey
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)		
a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	TOR Humas dan TI
b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Dokumen Print Screen Pelayanan Publik online, dokumen pendukung Pelayanan berbasis IT
c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Perbaikan dilakukan secara terus-menerus	Dokumen Print Screen Pelayanan Publik online, dokumen pendukung Pelayanan berbasis IT

Saat ini Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta terus menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2014-2019 dalam 8 (delapan) area perubahan dan mengembangkan berbagai program berbasis

elektronik (*e-government*) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan, berbagai permasalahan yang mengakibatkan system penyelenggaraan pemerintahan tidak jalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui sehingga reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2017

NO	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2017	% REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS JENDERAL	15.811.743.000	16.838.788.394	106,50%
2	DITJEN AHU	5.026.790.000	5.019.764.734	99,86%
3	DITJEN PAS	764.332.000	748.476.380	97,93%
4	DITJEN IMIGRASI	882.000.000	881.159.589	99,90%
5	DITJEN HKI	228.057.000	228.057.000	100,00%
6	DITJEN PP	195.000.000	194.130.697	99,55%
7	DITJEN HAM	239.759.000	239.454.500	99,87%
8	BPHN	2.277.970.000	2.126.071.350	93,33%
9	BALITBANG HUKUM DAN HAM	87.250.000	86.800.000	99,48%
10	BPSDM	481.760.000	437.840.022	90,88%
11	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	14.431.822.000	13.604.692.629	94,27%
12	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA YOGYAKARTA	9.420.481.000	9.343.660.820	99,18%
13	LAPAS KELAS II B SLEMAN	9.875.953.000	9.824.258.957	99,48%
14	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	6.758.566.000	6.666.035.201	98,63%
15	RUTAN KELAS II B BANTUL	7.144.247.000	7.119.827.410	99,66%
16	RUTAN KELAS II B WONOSARI	5.848.119.000	5.820.136.459	99,52%
17	RUTAN KELAS II B WATES	5.317.365.000	5.306.142	99,79%
18	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	4.468.238.000	4.372.034.185	97,85%
19	BAPAS KELAS II WONOSARI	1.896.329.000	1.875.300.095	98,89%
20	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	3.661.235.000	3.629.396.074	99,13%
21	RUPBASAN KELAS II BANTUL	1.631.640.000	1.1.614.944.668	98,98%
22	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	1.025.533.000	1.002.928.465	97,80%
23	RUPBASAN KELAS II WATES	1.361.531.000	1.360.922.075	99,96%
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YOGYAKARTA	384.943.000	371.579.451	96,53%

25	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK	7.519.823.000	5.209.074.504	69,27%
26	KANTOR IMIGRASI	12.064.490.000	10.935.703.295	90,64%
TOTAL		118.804.976.000	109.276.525.301	91,98%



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan jajarannya berada pada angka 91,98 % (sembilan puluh satu koma sembilan puluh delapan persen)/ data pertanggal 31 Desember 2017.

Selain itu pula, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY juga memperoleh penghargaan dari berbagai instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik vertikal maupun horisontal, antara lain menerima Penghargaan Pengelola Website Terbaik, Penghargaan dalam Pameran Pembangunan Provinsi DIY, menerima Penghargaan dari Kantor Wilayah Perbendaharaan Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, selama tahun anggaran 2017 Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta telah menjalankan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2014-2019 dalam 8 (delapan) area perubahan dan mengembangkan berbagai program berbasis elektronik (*e-government*) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

B. Rencana Tahun 2018

Selanjutnya, dari uraian Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY tahun 2017 tersebut, terdapat beberapa catatan dan rencana tindak lanjut hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Pentingnya mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;

- b. dibutuhkan peningkatan komitmen antar Divisi di Jaringan Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- c. Penetapan tujuan dan sasaran strategis agar menjadi pelajaran dalam rangka meningkatkan Jaringan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY pada periode berikutnya;
- d. Melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Divisi Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah dengan memaksimalkan peran eselon III dan IV 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar divisi melalui pelaksanaan rapat kerja lintas divisi secara periodik 3. Pelaksanaan kinerja harus mengacu pada rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan 4. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT atau e-Government 5. Realisasi anggaran dengan tingkat penyerapan yang tinggi diawal tahun anggaran 6. Bersama-sama mewujudkan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta menjadi urutan 5 besar Kanwil terbaik 7. Tim saber Pungli diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberantasan pungli di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta 8. Adanya control room di Kantor Wilayah untuk memantau keamanan dan kinerja UPT yang terhubung dengan CCTV UPT jaringan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta
Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi terkait bebas pungli kepada seluruh pegawai di UPT Pemasarakatan secara berkesinambungan; 2. Peningkatan kapasitas SDM berupa gerakan revolusi mental melalui ESQ; 3. Pemetaan dan pemberian peringatan kepada petugas yang terindikasi melakukan pungli; 4. Penindakan kepada pelaku pungli; 5. Meningkatkan kapasitas operator (operator SIMAK BMN, SAIBA, RKA-KL, SDP, PB, CMB, CB, dan Remisi) melalui pelatihan; 6. Menambah peran pimpinan/atasan langsung dalam pelaksanaan SPIP termasuk kegiatan apel dan jurnal harian kinerja; 7. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian masing-masing petugas; 8. Memberikan rewards dan punishment kepada petugas pemasarakatan.

Divisi Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kualitas Sistem APOA di Wilayah; 2. Pembayaran PNPB layanan Izin Tinggal secara online; 3. Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal secara online; 4. Memaksimalkan Unit Layanan Paspot Bantul.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi SDM bagian Pelayanan, memenuhi sarana dan prasana yang memadai, memaksimalkan peran PPNS di Kanwil, koordinasi lebih intensif dengan INI 2. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait pelaksanaan semua kegiatan di Divisi Pelayanan Hukum 3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat

Akhirnya, perlu disadari bahwa pekerjaan tugas dan tanggung jawab di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY sangatlah kompleks dan tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh *stake holder* dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan dimulai dengan dilakukannya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dengan baik.

Tahap selanjutnya adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak atau instansi terkait, seluruh *stake holder*, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam hal perencanaan, perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas di Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dan terpadu.

Semoga Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Tahun Anggaran 2017 serta menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada publik.



Yogyakarta, Januari 2018
Kepala Kantor Wilayah

GUNARSO
NIP. 19580923 198103 1 002